

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah melakukan *coding sheet* terhadap 124 artikel berita SKH Kompas dan Koran Tempo untuk melihat kecenderungan ketidakberpihakan media melalui konflik KPK dan Polri terkait simulator SIM. Selanjutnya peneliti melakukan uji beda untuk melihat perbedaan dari tiap unit analisis. Hasilnya tidak ditemukan keberpihakan yang signifikan di antara keduanya, ketidakberpihakan terhadap Polri di tampilkan dengan persentase yang rendah di antara keduanya, sedangkan keberpihakan pihak yang pro terhadap KPK di sajikan dengan persentase yang lebih besar. Persentase kedua media tersebut dalam melihat ketidakberpihakan media selisihnya sangat kecil.

Setiap pemberitaan yang ditampilkan oleh media cetak sebaiknya memperhatikan kualitas pemberitaan. Media harus berfungsi secara maksimal, tidak memihak, objektif dan berimbang dalam melakukan pemberitaan. Meskipun begitu, proses seleksi yang terjadi hingga menghasilkan sebuah berita tetap akan memunculkan kecenderungan-kecenderungan yang tampak dari teks berita itu sendiri. Kecenderungan ketidakberpihakan media terlihat dalam *balance* dan *neutrality* dalam pemberitaan konflik KPK dan Polri terkait simulator SIM.

Analisis kecenderungan ketidakberpihakan media yang digunakan dalam penelitian ini melihat bagaimana Koran Tempo dan SKH Kompas sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut terlihat dari keseimbangan porsi

alinea yang tampak jelas bahwa adanya bias yang rendah akan kecenderungan untuk menghadirkan pihak yang tidak seimbang dan masih adanya *slant* berupa kritikan terhadap kinerja dari Polri. Selain itu netralitas pemberitaan juga terlihat bias yang tinggi dalam penggunaan aspek dramatisasi dan penonjolan emosi.

Kedua media tersebut memiliki porsi kecenderungan yang berbeda-beda. Kompas terlihat lebih netral dalam pemberitaannya dan tidak terlihat menonjol dalam menampilkan kecenderungan kontra terhadap Polri. Hal tersebut terlihat dari rendahnya *source bias* porsi ketidakseimbangan. Tempo lebih banyak menampilkan pemberitaan dari satu sisi dibandingkan dengan Kompas serta memberikan porsi pemberitaan yang lebih kepada pihak kontra terhadap sikap dari Polri terkait simulator SIM.

Sedangkan dalam aspek netralitas, Koran Tempo mengandung netralitas yang rendah yang terlihat dari tingginya sensasionalisme pemberitaan. Penggunaan istilah yang mendramatisir yang dilakukan oleh Tempo lebih tinggi yaitu sebesar 6,84% serta penonjolan emosi sebesar 1,38% ditemukan dalam media ini. Selain itu, dalam media ini juga masih ditemukan adanya stereotipe sebesar 4,10% dan tidak terdapat *juxtaposition* serta *linkage*.

Sedangkan Surat Kabar Kompas memiliki kandungan *slant* terhadap KPK dan Polri serta porsi ketidakseimbangan pemberitaan dengan persentase yang rendah dibandingkan dengan koran Tempo. Persentase adanya *source bias* terhadap KPK sebesar 9,80%, tidak mengandung *source bias* terhadap Polri, mengandung *slant* terhadap KPK sebanyak 3,92%, mengandung *slant* terhadap Polri sebanyak 1,69% dan reperentasi pro kontra sebesar 62,74%. Hasil penelitian

menunjukkan Koran Tempo memiliki kecenderungan yang hampir sama dengan menghadirkan porsi yang lebih banyak pro terhadap KPK dan kontra terhadap Polri. Bila dilihat dari aspek netralitas, Koran Tempo lebih banyak menggunakan kalimat yang mengandung sensasionalisme dan emosionalitas di bandingkan dengan SKH Kompas.

SKH Kompas mengandung aspek penonjolan emosi sebesar 7,84% dan tidak mengandung aspek Dramatisasi. Meskipun demikian jumlah berita yang disajikan Koran Tempo lebih banyak daripada SKH Kompas. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan perhatian lebih yang diberikan Tempo terhadap konflik tersebut di bandingkan dengan Kompas.

Harian Kompas adalah media yang cenderung lebih *balance* dan memiliki dimensi netralitas yang tinggi yang lebih baik dibandingkan dengan Koran Tempo. SKH Kompas dan Koran Tempo memiliki kelebihan masing-masing dalam setiap unsur. Berdasarkan hasil peneliti ketidakberpihakan media yang disajikan oleh kedua media dapat dikatakan sudah objektif meskipun keberpihakan terhadap KPK masih terlihat dengan persentasi yang berbeda dan keberpihakan terhadap Polri hanya sedikit ditampilkan oleh pihak Tempo.

Berdasarkan hasil uji beda antara kedua media dapat terlihat bahwa nilai signifikan yang rendah. Dari hasil tersebut tidak dapat dikatakan keberpihakan antara kedua media lebih berpihak kepada KPK atau Polri, karena perbedaannya sangat kecil maka dikatakan tidak signifikan atau tidak ada beda antara keduanya. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa SKH Kompas dan Koran Tempo memiliki kecenderungan aspek ketidakberpihakan yang relatif baik.

B. Saran

1. Bagi media

Dalam pemberitaan hendaknya media tetap mempertimbangkan aspek *balance* dan *neutrality*. Hal tersebut nantinya akan dinilai oleh pembaca yang pada akhirnya akan lebih selektif memilih berita berdasarkan kualitas.

2. Bagi pengguna media

Media dapat melihat kualitas media tersebut dalam pemberitaan yang ditampilkan selama ini, sehingga nantinya dapat lebih kritis melihat pemberitaan yang disajikan media dalam konflik antara KPK dan Polri dalam kasus simulator SIM.

3. Bagi penelitian yang akan datang

Keterbatasan metode penelitian dengan menggunakan analisis isi untuk melihat ketidakberpihakan media masih kurang sehingga dalam penelitian ini peneliti tidak bisa mengetahui alasan adanya unsur-unsur yang seharusnya tidak terdapat dalam penyajian sebuah berita tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, dibutuhkan metode dan penelitian lain dan analisis yang lebih mendalam lagi untuk menjawab kendala yang ada. Misalnya dengan menggunakan analisis framing dan dengan perbandingan media lokal sehingga lebih terlihat perbedaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinanto. 2004. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Birowo, Antonius, (ed). 2004. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Eriyanto, 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana: Jakarta.
- Effendy, Onong Uchayana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasrullah, 2001. *Megawati dalam Tangkapan Pers*. Yogyakarta: LkiS
- McQuail, Denis, 1991. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga. Edisi Kedua.
- McQuail, Denis, 1992. *Media Performance: News Reporting and Writing*. New York: McGraw-Hill.
- Morissan, M.A., Andy Corry W, Farid Hamid, 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahabeat, Rudolf. 2004. *Politik Persaudaraan Membedah Peran Pers*. Yogyakarta: Penerbit buku baik.
- Rahayu, 2006. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Krayon Grafika: Jakarta.
- Mallarangeng, Rizal. 2010. *Pers Orde Baru: Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*. PT. Gramedia: Jakarta.

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Keller, Anett, 2009. *Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi Media Cetak Nasional Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*: Friedrich Ebert Stiftung: Jakarta.
- Krippendorff, Klauss. 1991. *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Media Group. Gramedia: Jakarta.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Komputer, Wahana. 2009. *Pengolahan Data SPSS 16.0*. Jakarta: Salemba infotek.
- Siregar, Ashadi,dkk. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Kanisius: Yogyakarta.
- Siregar, Ashadi. 2006. *Etika Komunikasi*. Penerbit Pustaka. Yogyakarta.
- Yanuarti, Sri, dkk. 1997. *Tentang Nepotisme: Analisis Isi media Massa*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

SKRIPSI

- Aditya, Lucas. *Faktualitas Berita dalam Laporan Utama di Majalah Berita Mingguan Tempo (Studi Analisis Isi Faktualitas Berita Mingguan Tempo Periode 1 Mei-31 Juli 2010)*. UAJY. Skripsi.

Divina, Maria. *Kasus Mafia Pajak Gayus Halomoan P Tambunan Dalam Pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas dan Tempo (Analisis Isi Berita pada Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Tempo Periode November 2010-Januari 2011)*. UAJY. Skripsi.

Dwiyuniarti, Rosyana. *Objektivitas Pemberitaan KPK dan POLRI Dalam Kasus Bibit-Chandra (Analisis Isi Berita Kasus Bibit-Chandra dalam SKH Kompas dan Kedaulatan Rakyat Periode 11 September - 2 Desember 2009)*. UAJY. Skripsi.

Eltariza, Lucia. *Pemberitaan Studi Banding Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat ke Luar Negeri (Studi Analisis Isi Kecenderungan Sikap Media dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia, Kompas dan Koran Tempo Periode April-Mei 2011)*. UAJY. Skripsi.

ARTIKEL

Tempo, 1 Agustus 2012

Tempo, 15 September 2012

Tempo, 1 Oktober 2012

Tempo, 2 Oktober 2012

Tempo, 5 Agustus 2012

Tempo, 4 Oktober 2012

Tempo 4 Agustus 2012

Tempo, 26 September 2012

Kompas, 1 Agustus 2012

Kompas, 3 Agustus 2012

Kompas, 10 September 2012

Kompas, 11 Agustus 2012

Kompas, 4 September 2012

Kompas, 10 September 2012

Kompas 17 September 2012

Majalah Tempo, 29 April 2012

WEBSITE

www.dewanpers.or.id

www.kompas.com



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Coding Sheet

Analisis Kecenderungan Ketidakberpihakan Media
Pemberitaan Konflik KPK dan POLRI terkait Simulator SIM
Surat Kabar Kompas dan Koran Tempo
Periode Agustus 2012-Oktobre 2012

Instruksi 1: Isilah data-data di bawah ini dengan huruf balok !

Surat Kabar Harian : KOMPAS / TEMPO

Judul Berita : _____

Tanggal Terbit : _____

Nama Pengkoding : _____

Instruksi 2: Pada bagian ini anda dimohon untuk memberikan respon atas setiap pernyataan dengan memberikan tanda silang (X) pada bagian yang telah disediakan. Berikan satu jawaban saja di setiap pernyataan berikut:

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	a) Terdapat nada berita yang hanya mengangkat komentar dari satu sisi terhadap KPK b) Terdapat nada berita yang hanya mengangkat komentar dari satu sisi terhadap POLRI		
2	a) Terdapat pujian terhadap KPK yang memberikan gambaran positif ataupun negatif atau kritikan seputar berita yang merupakan opini wartawan b) Terdapat pujian terhadap POLRI yang memberikan gambaran positif ataupun negatif atau kritikan seputar berita yang merupakan opini wartawan		

3	Terdapat porsi alinea berita yang seimbang mengenai dihadapkannya pendapat pro-kontra dalam teks berita antara KPK dan POLRI		
4	Terdapat tokoh yang didominasi dan paling berpengaruh daripada tokoh lainnya dalam teks berita (KPK/POLRI)		
5	Terjadi penonjolan aspek emosional suka, benci, marah, sedih, gembira, ataupun opini penulis terhadap (KPK/POLRI)		
6	Terjadi dramatisasi atau penulisan berita yang hiperbolik dan melebihi-lebihkan suatu fakta (sangat, luar biasa) untuk memberi kesan dramatis terhadap (KPK/POLRI)		
7	Terjadi penggunaan atribut kata tertentu yang berasosiasi pada tokoh atau kelompok dalam berita		
8	Wartawan menyajikan dua hal yang tidak sebanding untuk menghasilkan kesan dramatis dalam berita		
9	Wartawan membandingkan dua hal yang tidak berhubungan untuk menimbulkan efek sebab akibat dalam berita		

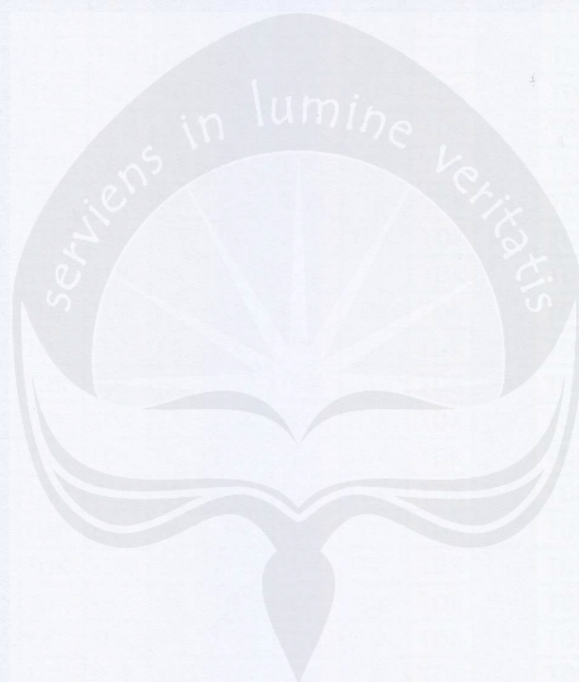
SKH Kompas

No Berita		1		2		3	4	5	6	7	8	9
		A	B	A	B							
1		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
2		TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
3		TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
4		TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK
5		YA	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
6		TDK	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
7		TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
8		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
9		YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
10		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
11		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
12		TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		YA	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
13		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
14		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
15		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	

16	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
17	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
18	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
19	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
20	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
21	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
22	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
23	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
24	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
25	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
26	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
27	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
28	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
29	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
30	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK
31	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
32	TDK	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK

[illegible]

Wien		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
India		YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Wien	50	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Wien		YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
India		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Wien	51	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Wien		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK



Koran Tempo

No Berita	1		2		3	4	5*	6	7	8	9
	A	B	A	B							
1	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
2	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
3	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
4	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
5	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK
6	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
7	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
8	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
9	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
10	TDK	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
11	TDK	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
12	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
13	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
14	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
15	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
16	TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK

[illegible]

33	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
34	TDK	TDK	YA	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
35	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
36	TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
37	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
38	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
39	TDK	YA	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
40	TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
41	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
42	TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
43	TDK	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
44	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
45	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
46	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK
47	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
48	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
49	TDK	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK

[illegible]

Kien		YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
India	67	YA	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Sil		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Kien		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
India	68	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Sil		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Kien		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
India	69	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Sil		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Kien		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
India	70	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Sil		TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK
Kien		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK
India	71	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	YA	YA	TDK	TDK
Sil		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK
Kien		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK
India	72	TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Sil		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Kien		TDK	TDK	TDK	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
India	73	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Sil		YA	TDK	YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK
Kien		YA	TDK	YA	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK	TDK

T-Test

Group Statistics

Koran		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Unit1_A	Kompas	51	.10	.300	.042
	Tempo	73	.11	.315	.037
Unit1_B	Kompas	51	.02	.140	.020
	Tempo	73	.03	.164	.019
Unit2_A	Kompas	51	.04	.196	.027
	Tempo	73	.07	.254	.030
Unit2_B	Kompas	51	.02	.140	.020
	Tempo	73	.01	.117	.014
Unit3	Kompas	51	.63	.488	.068
	Tempo	73	.75	.434	.051
Unit4	Kompas	51	.02	.140	.020
	Tempo	73	.00	.000	.000
Unit5	Kompas	51	.08	.272	.038
	Tempo	73	.01	.117	.014
Unit6	Kompas	51	.02	.140	.020
	Tempo	73	.07	.254	.030
Unit7	Kompas	51	.00	.000	.000
	Tempo	73	.04	.200	.023
Unit8	Kompas	51	.00	.000 ^a	.000
	Tempo	73	.00	.000 ^a	.000
Unit9	Kompas	51	.00	.000 ^a	.000
	Tempo	73	.00	.000 ^a	.000

a. t cannot be computed because the standard deviations of both groups are 0.

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Unit1_A	Equal variances assumed	.169	.682	-.205	122	.838	-.012	.056	-.123	.100
	Equal variances not assumed			-.207	110.806	.837	-.012	.056	-.122	.099
Unit1_B	Equal variances assumed	.305	.581	-.276	122	.783	-.008	.028	-.064	.048
	Equal variances not assumed			-.284	117.185	.777	-.008	.027	-.062	.047
Unit2_A	Equal variances assumed	1.960	.164	-.691	122	.491	-.029	.042	-.113	.055
	Equal variances not assumed			-.723	120.765	.471	-.029	.040	-.109	.051
Unit2_B	Equal variances assumed	.260	.611	.255	122	.799	.006	.023	-.040	.052
	Equal variances not assumed			.247	95.003	.805	.006	.024	-.042	.053
Unit3	Equal variances assumed	7.921	.006	-1.510	122	.134	-.126	.083	-.291	.039
	Equal variances not assumed			-1.479	99.396	.142	-.126	.085	-.295	.043
Unit4	Equal variances assumed	5.983	.016	1.199	122	.233	.020	.016	-.013	.052
	Equal variances not assumed			1.000	50.000	.322	.020	.020	-.020	.059
Unit5	Equal variances assumed	14.241	.000	1.812	122	.072	.065	.036	-.006	.135
	Equal variances not assumed			1.602	63.085	.114	.065	.040	-.016	.145

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Unit6	Equal variances assumed	6.657	.011	-1.246	122	.215	-.049	.039	-.127	.029
	Equal variances not assumed			-1.371	116.462	.173	-.049	.036	-.119	.022
Unit7	Equal variances assumed	9.389	.003	-1.466	122	.145	-.041	.028	-.097	.014
	Equal variances not assumed			-1.757	72.000	.083	-.041	.023	-.088	.006



Case Summaries

[illegible]

Case Summaries

[illegible]

Case Summaries

[illegible]



"Siapa yang duluan?
Ya, KPK."

Penyidikan Polisi Cacat Hukum

JAKARTA — Pengamat hukum tata negara dari Universitas Kharun, Temale, Margarto Kamis, menilai penyelidikan dan penyidikan polisi atas kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi cacat hukum. Musabahnya, kewenangan penuntasan kasus itu ada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah lebih dulu menyelidiki. Margarto menilai polisi tak bisa memastikan investigasi bersama. "Tak ada dasar hukumnya," katanya, kemarin.

Senada dengan Margarto, peneliti Pusat Kajian Anti-korupsi Universitas Gadjah Mada, Ode Madhi, mengatakan kewenangan polisi justru menunjukkan sikap tak memahami hukum. Menurut Ode, meski polisi berwenang menegakkan hukum, kewenangan itu hilang saat proses penyelidikan dilakukan oleh KPK. "Ini perlakuan khinas untuk KPK," katanya.

Ketua KPK Abraham Samad meminta polisi memati Undang-Undang KPK, yang menyebutkan kepolisian atau lembaga tak berwenang lagi menyelidiki jika KPK sudah mulai menyelidiki. Menurut Abraham, dari segi penyelidikan dan penyidikan, lembaga lebih dulu membatalkan penyelidikan mulai Januari 2012. "Kami menekan surat perintah penyelidikan pada 27 Juli. Siapa yang duluan? Ya,



Polisi penguji berusaha memperbaiki simulator ujian surat izin mengemudi untuk kendaraan sepeda motor di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jawa Barat, kemarin.

KPK," katanya. Pun Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mene-gaskan polisi harus mundur "Itiyya," sekatang. Kami sudah tahap penyelidikan, se-hingga instansi lainnya harus berhenti mengusut kasus ini," ujar Bambang.

Jumat pekan lalu KPK menetapkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas ini diduga terlibat kasus dugaan korupsi

pengadaan simulator. Tapi, saya," katanya, ia mengklaim saat mengeledah kantor Korps Lalu Lintas, petugas KPK dibalangi oleh polisi. Pengelabahan yang dimulai Senin sore baru berakhir Selasa petang lalu.

Martas Besar Kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan polisi lebih dulu menyelidiki. "Tak bisa berhenti begitu



Polisi Dinilai Pertontonkan Pembangkangan Hukum

"Masak, undang-undang dilawan?"

JAKARTA — Pengamat hukum dari Pusat Kajian Anti-korupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menilai polisi tak ubahnya melakukan perbuatan melawan hukum atau *unlawful action*. Menurut dia, sikap polisi yang berkukuh mengusut kasus simulator sama saja menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. "Itu bisa diperkarakan," kata Hifdzil saat dihubungi kemarin.

Menurut Hifdzil, sikap Mabes Polri dengan tetap menyidik kasus simulator bertentangan dengan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan itu dengan

tegas menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga yang berwenang ketika penyidikan dilakukan secara bersamaan. "Masak, undang-undang itu dilawan? Mabes Polri ini sebenarnya tidak bodoh dan tahu benar adanya undang-undang itu," ujarnya.

Jika tetap *ngotot* melanjutkan kasus tersebut, Hifdzil menduga polisi sedang melindungi suatu kepentingan. "Mungkin mereka melindungi jenderal bintang satu atau duanya, melindungi korpsnya, atau melindungi bisnis mereka sendiri."

Kritik lebih keras diungkapkan Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto. Menurut dia, sikap polisi itu justru mempertontonkan pembangkangan terhadap hukum.

"Jadi, masihkah kita percaya mereka menegakkan hukum, jika mereka sendiri melanggar hukum?" ujar Agus kemarin.

Namun, dalam keterangan persnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan polisi punya alasan kuat untuk tetap mengusut kasus simulator. Polisi merujuk pada yurisprudensi *joint investigation* antara KPK dan lembaga hukum lain.

Sutarman menyebut adanya kerja sama KPK dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat mengusut kasus Anggaran Daerah Langkat. KPK saat itu menyidik tersangka Syamsul Arifin, bekas Bupati Langkat yang kemudian menjabat Gubernur Sumatera Utara. Sedangkan

pihak lainnya ditangani Kejaksaan Sumatera Utara.

Ihwal barang bukti hasil penggeledahan Markas Korlantas, Sutarman mengatakan, akan digunakan bersama oleh polisi dan KPK. Saat ini barang bukti tersebut tersimpan dan digembok. "Kedua pihak sama-sama memegang kuncinya," ucapnya.

Adapun juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menegaskan, lembaganya tidak bermaksud melanggar etika sesama lembaga penegak hukum. Buktinya, kata dia, nota kesepahaman dengan Polri tetap menjadi perhatian. Salah satunya, menggelar pertemuan antara pimpinan KPK dan Kepala Polri sebelum penggeledahan pada Senin lalu.

● GADIS MAJLIS | ANDRIKA DESPANI | BIMA SAYUTU | TRI SUPRANAH | BUKANA

Polisi

ji
li
k
u
m
se
hi
U:
Ze
tai
ka
na
jo
ma
ket
sen
A
Pol
yan
bur
tup
inte

Koran TEMPO, Sabtu, 4 Agustus 2012

Barang Bukti Simulator Masih Dijaga Ketat

JAKARTA — Hingga beberapa hari setelah dibawa ke lingkungan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peti kemas yang berisi barang bukti kasus dugaan korupsi simulator ujian pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) masih teronggok di pelataran belakang. Seperti terlihat kemarin, kontainer itu dijaga ketat oleh sejumlah anggota Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian RI.

Peti kemas berukuran 4 x 2 meter itu belum dibongkar, sehingga isinya belum diangkut ke ruang penyidikan di lantai 8 gedung KPK.

Lima pria berbadan tegap tanpa seragam terlihat siaga mengawasi peti kemas berwarna cokelat muda tersebut. "Penjagaan tersebut dilakukan secara bergantian, siang dan malam," kata seorang petugas KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan penjagaan dilakukan atas izin komisinya. Ia membantah dugaan bahwa mereka dikirim khusus oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri untuk menjaga barang bukti yang juga digunakan Polri untuk mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut. "Hanya untuk menjaga saja,

tidak bermaksud menghalang-halangi," kata Bambang, Kamis malam lalu.

Sumber Tempo di KPK menyebutkan, pejaagaan ketat oleh anggota Propam semacam itu tidak biasa. Begitu juga bahwa barang bukti tertahan sekian lama. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya "gerakan internal" yang bisa merusak barang bukti. "Para penyidik juga berasal dari kepolisian, jadi jangan sampai ada upaya khusus (merusak)," ujar sumber itu.

Kasus dugaan korupsi simulator ujian SIM itu kini menjadi rebutan antara Polri

dan KPK. Masing-masing lembaga merasa berhak mengungkap kasus yang melibatkan petinggi kepolisian tersebut.

KPK sudah menetapkan empat tersangka, tiga di antaranya oknum polisi. Sedangkan Polri menetapkan lima tersangka.

Senin lalu, KPK mengelekdah kantor Korps Lalu Lintas di kawasan Jakarta Selatan. Penggeledahan berlangsung alot dan dikabarkan ada upaya menghalang-halangi kegiatan tersebut. "Memang ada ketidakpahaman saat penggeledahan, tapi bisa diselesaikan dengan baik," kata Bambang. • IRI SUHARMAN

PENAHANAN TERSANGKA KASUS SIMULATOR KPK Gelar Rapat Maraton

KPK tak akan menyerahkan pengusutan ke polisi.

JAKARTA — Masih panasnya situasi terkait dengan penanganan kasus simulator ujian surat izin mengemudi memaksa sejumlah pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat sejak Jumat lalu. Salah satunya membahas tindakan polisi menahan para tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjo-janto mengkritik penahanan para tersangka oleh polisi mempengaruhi kinerja lembaga. "Kalau dibuang tidak mempengaruhi itu salah, ujar Bambang sesuai rapat di kantornya tadi malam. Karena itu, dia melanjutkan untuk mengkritik hal ini, mereka akan menggelar pertemuan dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.

KPK mengurut kasus korupsi simulator ujian SIM sejak Januari 2012 dan menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kepala Korps

Lalu Lintas yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 27 Juli lalu. Selain kemudian menyusul Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas. Serta dua tersangka yang merupakan rekanan proyek, yakni Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukhojo S. Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto.

Namun, polisi mengklaim juga menangani kasus itu sejak Mei lalu. Polisi pun tak mau kalah dengan menetapkan lima tersangka sejak 1 Agustus lalu. Mereka adalah Jenderal Didik, Sukhojo, Budi Susanto, serta Ajun Komisaris Besar Teddy Rismawan (Ketua Primer Koperasi Polisi) dan Komisaris Legitmo (Bendahara Korps Lalu Lintas). Tiga di antaranya, yakni Didik, Teddy, dan Legitmo, ditahan di Markas Komando Brimbo Kelapa Dua, Depok, sejak Jumat lalu.

Bambang menegaskan bahwa KPK tidak akan menyerahkan pengusutan kasus tiga tersangka ke pihak Mabes Polri. Dia menegaskan, pimpinan KPK solid dan mengacu pada Pasal

50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 50 ayat 3 menyebutkan, polisi membantu melakukakan penyidikan jika KPK menuntut kasus yang sama.

Polemik berkembang karena sejak Jumat malam lalu muncul isu polisi bakal menampas barang bukti yang disita KPK. Barang bukti itu disimpan dalam peti kemas di belakang kantor KPK. Seorang petugas keamanan di gedung KPK ber cerita bahwa barang bukti itu dijual empat polisi.

Saat *Tempo* menjangkit, empat orang itu enggan bicara. "Silakan ke pimpinan, ujar pria berbadan baik biru. "Kami bukan siapa-siapa. Hanya *cleaning service*."

Bambang yakin polisi tidak mungkin menampas barang bukti sitaan KPK. "Polisi akan ari dan bijak sana. Dan tahu persis, dalam kasus ini, pengadilan yang memutuskan" katanya.

Juni bicara KPK, Johan Budi S.P., menambahkan, pengejaan oleh polisi atas koordinasi lembaga. "KPK bisa mengakses, begitu pun kepolisi-an," kata dia. • www.tempoonline.com | SUMA

Koran TEMPO, Senin, 6 Agustus 2012



OPRADA MEMPERTAHKAN ORANG

Dukung KPK

Selanjutnya orang dari komunitas CICAQ (Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi) membuat rental manusia di depan peti kemas tempat Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpan barang bukti kasus suap pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi di Jakarta kemarin.

Malam-malam Genting di Kantor KPK

Malam malam, malin, pekat aura ketegangan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Jumat malam pekan lalu hingga Ahad dinikmati kemarin/ tidak seperti biasanya, tiga pintu utama kantor KPK dibagi empat-tujuh petugas keamanan.

Bola mata mereka berputar-putar mengamati lalu-lalang orang yang lewat di luar pintu gerbang kantor KPK. Sebagian lainnya terus berkomunikasi dengan teman jaganya melalui perangkat *handy talkie*.

Paling mencolok adalah empat petugas keamanan yang berjaga di pintu kiri, yang dihadapkan dengan jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Selain membawa alat komunikasi dan perlengkapan badan mereka dibalut rompi anti-pemukul.

Sumber *Tempo* mengatakan rompi anti-pemukul ini dikenakan petugas keamanan KPK sejak Jumat malam

lalu. Rompi tersebut dipakai setelah

mereka mendapat pengajaran dan komandannya bahwa situasi genting, lalu yang beredar, bakal ada petan-pasan barang bukti silaen KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi.

Tak jelas siapa yang hendak menaklukkan petugas ber kardus-kardus barang bukti yang tersimpan dalam kontainer terkunci dan dibagi empat polisi itu. Yang jelas, sampai Ahad siang, penjagaan gedung KPK mulai mengendur, tanda berkurangnya potensi ancaman.

Tempo mengamati, kontainer yang semula diawasi oleh orang tinggal dibagi oleh seorang petugas. Begitu pula pintu masuk KPK, pada bagian depan hanya dibagi oleh empat petugas keamanan. Sedangkan pintu keluar ditutup rapat dan dibagi oleh dua petugas.

Kemarin, menjelang magrib,

beberapa aktivis anti-korupsi datang. Mengatakan kasus hilir dan putih bertuliskan "KPK You're Not Alone", mereka menobatkan diri sebagai bagian dari komunitas "CICAQ".

Cinta Indonesia Cinta Anti-Korupsi. Mereka menyeru agar KPK bebas dari intervensi pihak luar. "Publik ingin tidak ada pembaruan terhadap pelanggaran undang-undang (UU) KPK", kata David Basri, salah satu aktivis.

Jura bicara KPK, Johan Budi S.P., saat dimintai konfirmasi menanti adanya pengamanan ekstra di kantornya. Pengamanan normal juga dibungkapkan seorang petugas. "Sebanyak

24 orang yang jaga malam di gedung KPK. Bukan petugas khusus," kata Sahli A., seorang petugas keamanan, kepada *Tempo*. • **TRISMANA | POKA KOSI | SMA SUMA | SAN MUMU | PMS**

Koran TEMPO, Sabtu, 11 Agustus 2012

Polisi Dinilai Basa-basi Tangani Korupsi

JAKARTA — Sejumlah kalangan menilai polisi hanya basa-basi dalam menangani sejumlah kasus korupsi. Banyak kasus yang ditangani polisi acap kali tak jelas penyelesaiannya. "Kepolisian banyak menunggak penuntasan kasus korupsi, tapi justru menambuh penanganan kasus lain," kata Ode Madril, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, tadi malam.

Pada awal Agustus lalu, Marhas Besar Kepolisian Republik Indonesia menetapkan sejumlah tersangka dari kepolisian dan rekanan swasta dalam kasus pengadaaan simulator kemudi kendaraan bermotor. Di tengah

memanasnya penanganan kasus itu, kepolisian kembali menetapkan tersangka dari Kementerian Kesehatan terkait dengan korupsi pengadaan vaksin flu burung. Menurut Ode, kasus korupsi di Kementerian Kesehatan dan simulator ujian SIM bukanlah kasus kecil. "Dua kasus terakhir itu masih mungkin membuat mana-mana," ujarnya. Kasus korupsi pengadaan instalasi flu burung misalnya, diduga berkaitan dengan Partai Demokrat. "Ada kesan bahwa kasus ini ingin diokalsiasi hingga tak menyeret politisi Demokrat."

Ketua Dewan Pengurus Masyarakat Transparansi

Indonesia Hamid Chaidi mengatakan polisi sebenarnya mampu menuntaskan kasus korupsi. "Tapi ada kepentingan yang bermain dalam penyidikan kasus yang ditangani Polri," kata dia. Maka wajar bila masyarakat tidak percaya kepada kepolisian. "Buktikan mereka benar integras dengan sikap besar hati mundur dari penanganan kedua kasus itu."

Kewenangan serupa datang dari Wakil Koordinator Badan Pelicita Indonesia Corruption Watch Emerson Yutho. Bukanya tanpa alasan, Emerson menyebutkan, setidaknya ada 20 kasus yang sampai saat ini tidak jelas ujungnya di tangan Mabes

Polri. "Saya khawatir kasus ini bermasib sama. Kasus ini bisa jadi 86 (kode kepolisian untuk mendamanatkan kasus) juga," kata dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rahli, meminta masyarakat tidak ragu akan niat kepolisian menangani kasus korupsi. Dia menambahkan jika kasus korupsi disebut bermasib tidak jelas, Masyarakat harus mendapat informasi mengenai penyelesaian kasusnya. "Jangan bersangka buruk. Datang ke kami, pasti dijelaskan satu-satu."

● SUMBER: ASPIR NASIONAL, TEMPO, JAKAR
SUKMA WIDATI (GAMBAR: CHANDRA)

Utang Kasus di Polisi

Banyak kasus dugaan korupsi yang ditangani kepolisian belum jelas akhirnya. Berikut ini contohnya.

2002	2003	2005	2006	2009	2010
Kasus PT Jan sositik dengan kerugian Rp 45 miliar. Mantan Direktur Utama PT Jansositik Akmal Hussein dan mantan Direktur Keuangan Horas Simatungur ditugaskan sebagai terduga. Proses hukumnya tidak jelas.	Proyek fiktif dan manipulasi data di PT Darma Mega dengan kerugian Rp 70 miliar. Polisi menetapkan tiga pelaku PT Darma sebagai terduga. Proses hukumnya tidak jelas.	Kasus Karana Bodas Company dengan kerugian Rp 50 miliar. Beberapa terduga antara lain: Robert D. Mac Chundhen dan Supranto Kencana (Diksi Geofinial Pertamina). Hanya dua kasus yang sampai ke pengadilan. Proses hukum tidak jelas.	Proyek pengadalan jaringan radio komunikasi dan alat komunikasi Mabes Polri dengan kerugian disekir Rp 240 miliar. Mabes memelihara mantan Kepala Dinas Telekomunikasi, Dwiati Tjennema, Satrio Satrio dan Satrio Satrio sebagai terduga. Proses hukum selanjutnya tak jelas.	Kasus Waseo Eksport Berjangka milk Unbank dengan kerugian disekir US\$ 230 juta atau sekitar Rp 2,1 triliun. Diduga melibatkan Komisaris PT 2,4 triliun yang dipekerjakan di bank BRI dan Bank Buxcoin. Proyek finansialnya ditelusuri. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.	Dugaan korupsi di Kementerian Pertambangan dan Energi. Pengetahuan dan pengalaman di negara bukan pajak sebesar Rp 2,4 triliun yang dipekerjakan di bank BRI dan Bank Buxcoin. Proyek finansialnya ditelusuri. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

KASUS SIMULATOR UJIAN SIM KPK Periksa Empat Polisi

Pejabat Kementerian Keuangan dicecar soal pencairan dana proyek.

rika pada Rabu lalu, tapi batal dengan alasan surat pemanggilan dari KPK salah mencantumkan nama dan pangkat.

Prharsa menolak memberikan hasil pemeriksaan para polisi itu. "Materi penyidikan tak bisa kami ungkapkan," kata Prharsa. Namun ia memastikan keempathnya adalah anggota panitia lelang dalam proyek senilai Rp 196 miliar itu.

Sukotjo S. Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto, KPK dan polisi sudah memeriksa Sukotjo di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru, Bandung.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi

kegiatan mulai memeriksa saksi dari kepolisian dalam kasus dugaan suap pengadaan stimulator ujian surat izin mengemudi. "Diperiksa untuk) keterkaitan dengan

Dalam kasus yang sama, polisi juga sudah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Didik, Sukotjo S. Bambang, Budi, serta Ketua Primer Koperasi Polisi Ajun Komisaris Besar Teddy

akan memeriksa empat perwiranya itu. Polisi, kata dia, tidak akan menyangka KPK dengan memeriksa saksi yang sama. "Tidak perlu ikut-ikutan. Tergantung penyidikannya, kalau diperlukan untuk diperiksa, ya, diperiksa," tuturnya.

Prharsa menolak memberikan hasil pemeriksaan para polisi itu. "Materi penyidikan tak bisa kami ungkapkan," kata Prharsa. Namun ia memastikan keempathnya adalah anggota panitia lelang dalam proyek senilai Rp 196 miliar itu.

KPK menetapkan Gubernur Akademi Kepolisian (monaktif) dan bekas Kepala Korps Lalu Lintas Djoko Susilo sebagai tersangka pada akhir Juli lalu. Selain Djoko, KPK menetapkan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Putriono sebagai tersangka. Dua tersangka lain yang sudah ditetapkan KPK adalah Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia

Korps Lalu Lintas Komisaris Legimo Djoko tak dipidakan, tetapi polisi sudah memeriksa Djoko sebagai saksi dalam kasus ini.

Pemeriksaan empat polisi untuk menpengaruhi penyidikan polisi Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI. Inspektur Jenderal Anang Iskandar mengatakan institusinya belum tentu

Polisi yang diperiksa adalah Ajun Komisaris Wisnu Budhaya, Ajun Komisaris Besar Wendy Rustiwan, Ajun Komisaris Besar Endah Purwaningsih, dan Komisaris Ni Nyoman Sutirni. Keempathnya sebenarnya dijadwalkan dipe-

KPK menetapkan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Putriono sebagai tersangka. Dua tersangka lain yang sudah ditetapkan KPK adalah Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia

Pemeriksaan empat polisi untuk menpengaruhi penyidikan polisi Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI. Inspektur Jenderal Anang Iskandar mengatakan institusinya belum tentu

Agus Suprijanto, dalam kasus ini Agus mengaku dicecar tentang pencairan dana proyek tersebut. "Cuma mekanisme pencairan anggaran," kata Agus setelah menjalani pemeriksaan. Kepada wartawan, Agus menjelaskan, duit proyek simulator ujian SIM yang dicairkan pada 2011 sekitar Rp 176 miliar. Duit itu dibayarkan dua kali, masing-masing Rp 127 miliar serta Rp 48 miliar.

• IR SUDHARNO / MEDIA MATA

Penarikan dicurigai
berhubungan dengan
kasus simulator
ujian SIM.

PENYIDIK DITARIK, KPK MELAWAN

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak rencana penarikan 20 penyidik mereka oleh Markas Besar Kepolisian. Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan bahwa para penyidik itu masih dibutuhkan untuk mengusut kasus korupsi yang ditangani lembaganya. "Pimpinan KPK memilih mempertahankan mereka," kata Johan, kemarin.

Menurut Johan, keputusan itu disepakati pimpinan KPK dalam rapat Jumat malam lalu. Rapat itu digelar setelah kepolisian mengirim surat yang menyatakan akan menarik 20 penyidik yang bertugas di KPK. Untuk memperjelas masalah ini, Ketua KPK Abraham Samad akan segera menemui Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. "Mereka (20 penyidik) bisa dipertahankan kalau Kapolri setuju."

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan ihwal penolakan itu. Pimpinan KPK, kata Busyro, khawatir penarikan itu mempengaruhi penanganan kasus korupsi. Musababnya, jumlah penyidik di KPK hanya 136 personel, dan 88 di antaranya berasal dari kepolisian. Sisanya adalah penyidik dari Kejaksaan Agung.

Padahal, saat ini KPK sedang menyelidiki dan menyidik banyak kasus korupsi. Bahkan, kata Busyro, saking terbatasnya tenaga KPK, saat ini satu penyidik menangani hingga tiga kasus korupsi.

Penyidik dari kepolisian, kata Busyro, juga dibutuhkan untuk mengusut kasus korupsi di daerah-daerah. "KPK masih butuh perwira-perwira menengah yang sudah menjalin komunikasi dengan para polisi di daerah." Jika Mabes Polri sampai menarik 20 penyidik itu,

Busyro khawatir warga yang melaporkan kasus korupsi ke KPK bakal kecewa karena laporannya terlambat ditangani.

Rencana Mabes Polri menarik penyidiknya ini kemarin menuai kritik keras. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, menduga penarikan itu berhubungan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian pembuatan surat izin mengemudi yang sedang ditangani KPK.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka utama. "Mengapa penarikan besar-besaran ini dilakukan bersamaan dengan penyidikan kasus simulator?" tanya dia.

Koordinator Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai polisi selalu mengguna-

kan taktik yang sama—menarik penyidiknya—ketika KPK sedang menangani kasus korupsi pejabat polisi. Tindakan yang sama pernah dilakukan Mabes Polri ketika KPK menangani perkara dugaan suap yang melibatkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Ketika ditanyai soal ini, Johan Budi enggan berspekulasi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, menegaskan bahwa KPK tidak bisa menahan 20 penyidik yang akan ditarik polisi. Dia juga meminta KPK tidak mengembangkan dugaan macam-macam soal motif penarikan ini. "Kami sudah menyiapkan penyidik baru untuk KPK. Kami pilih yang terbaik," katanya.

● TRI SUHARMAN | ANCHORITA DESYANI |
FEBRIANA FIRDAUS | PRAM

DPR Minta KPK Tolak Penarikan Penyidik

Kalau Mabes Polri *ngotot*, DPR meminta Presiden Yudhoyono turun tangan.

JAKARTA — Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan sikap Markas Besar Kepolisian yang menarik 20 penyidiknya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua Komisi Hukum Nasir Djanali menilai langkah itu berdampak buruk bagi citra polisi. "Maspraktat bisa melaini ada semacam aksi balas dendam," katanya kepada *Tempo* kemarin.

Komisir Hukum, kata Nasir, akan menanyakan masalah ini kepada Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dalam rapat kerja bersama dengan KPK dan Kejaksaan Agung besok. Rapat itu membahas koordinasi ketiga lembaga hukum tersebut dalam pemberantasan korupsi. "Kami akan mencari tahu apakah penarikan penyidik itu sudah dikordinasikan dengan KPK," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Nasir menilai penarikan penyidik secara sepihak akan sangat mengganggu kinerja komisi antikorupsi. Apalagi, jumlah penyidik KPK masih sangat terbatas. Dia juga menilai, seharusnya penarikan para penyidik tak dilakukan tiba-tiba. Polisi harus mempersiapkan penyidik pengganti sebelum menarik aparatnya di KPK. Setelah itu, KPK masih harus menguji kemampuan dan integritas para penyidik yang disodorkan kepolisi. "Proses penggantian ini panjang," katanya.

Polri menarik penyidiknya memang menimbulkan tanda tanya di benak banyak orang. Padahal, penarikan penyidik dilakukan Jumat lalu, persis sehari setelah KPK menandatangani nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia beraturan dengan penggunaan rumah tahanan Polisi Militer Kodam Jaya Ciumbur. KPK berencana menahan sejumlah tersangka di sana.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi

Partai Gerakan Indonesia Raya, Martin Hutabarat, menilai polisi terlalu gegabah menarik para penyidik secara bersamaan. Dia meminta Jenderal Timur Pradopo mengevaluasi rencana itu. "Jangan sampai masyarakat menilai yang tidak tidak," katanya.

Martin dan Nasir Djanali sepakat KPK bisa menolak rencana penarikan 20 penyidik itu. Jika polisi masih *ngotot*, mereka menyarankan KPK mengadu kepada Presiden.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan polisi siap memberi penjelasan kepada Komisi Hukum DPR. Boy menambahkan jika disebut ada penarikan penyidik dari KPK.

Menurut dia, penggantian penyidik karena masa jabatan mereka memang sudah habis. "Kami bekerja sesuai aturan. Dalam surat perintah di awal penugasan mereka, sudah disebutkan berapa panjang masa tugas para penyidik itu."

• FIRMANSYAH/REDAKSI INCCU

Tahun Depan Penyidik KPK Tinggal Tiga

JAKARTA — Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, memperkirakan jumlah penyidik Komisi pada Januari-Maret 2013 tinggal tiga orang. "Bagaimana mau menuntaskan kasus korupsi dengan kondisi demikian," ujarnya kemarin.

Komisi, kata dia, memi-

liki 78 penyidik polisi. Dari jumlah itu, 20 penyidik akan ditarik dan tidak diperpanjang masa tugasnya di KPK. Pengurangan penyidik berlanjut pada November setelah masa tugas 15 penyidik polisi berakhir. Pada Januari-Maret tahun depan, masa tugas hampir semua penyidik polisi berakhir di

lembaga antirasuah ini.

Sebelumnya, pimpinan KPK meminta perpanjangan 16 dari 20 penyidik yang ditarik dengan alasan masa tugasnya baru setahun dan empat penyidik merupakan kepala satuan tugas kasus korupsi tertentu.

Sumber Tempo menyebutkan, kepolisian berkukuh

menarik ke-20 penyidiknya. Bahkan para penyidik diancam, jika tetap memilih menjadi penyidik KPK, mereka akan diberhentikan secara tidak hormat. "Ancaman itu yang membuat mereka getir," kata sumber itu. Soal ancaman pemecatan ini, Abdullah mengaku belum mengetahuinya.

Menurut Abdullah, jika semua penyidik polisi ditarik, KPK harus mengantisipasi dengan merekrut penyidik internal. Juru bicara Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, mengungkapkan, 14 penyidik polisi sudah kembali berkantor di Markas Besar Polri. Mereka datang

kemarin sore, diantar oleh KPK.

Para penyidik yang kembali adalah karena masa tugasnya sudah berakhir pada 12 September 2012. Mereka terdiri atas enam orang berpangkat ajun komisaris besar dan delapan orang komisaris polisi.

● ALI MY | RUSMAN PARAGUEQ | ANTO PRIMA SANDA

102 B21

Koran TEMPO, Jumat, 28 September 2001

Anjing dan Dingin di Rumah Tahanan Guntur

Menikmati cerita mitos selalu lebih seru ketimbang melihat realitasnya. Itulah yang terjadi saat orang mendengar nama Rumah Tahanan Guntur di Manggarai, Jakarta Selatan. Ada banyak mitos seram di balik penjara militer yang santer dikabarkan akan dipinjam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menahan para koruptor tersebut. Semuanya bikin bulu kuduk berdiri.

Salah satu mitos yang kontradiktif di kalangan masyarakat, misalnya, di sana ada sel yang supersempit. Lebarnya konon hanya 0,5 meter sehingga tahanan hanya bisa berdiri. Juga soal kolam buaya di dalam penjara.

Kisah-kisah seram itu ditampik oleh Kepala Penerangan Pomdam Jaya Kolonel Adrian. "Tidak ada kolam buaya," ujar Kepala Penerangan Pomdam Jaya Kolonel Adrian. Dia kontan tergelak saat ditanya ihwal keberadaan kolam predator itu. "Memang sebagian gedung tua peninggalan Belanda," katanya.

Rumah Tahanan Guntur kemarin lengang. Tak banyak yang bisa dituturkan dari instalasi tahanan milik Polisi Militer Kodam Jaya itu. Berada di bagian belakang kompleks asrama, rumah tahanan ini tidak hanya dikelilingi tembok setinggi 5 meter dan kawat berduri di atasnya. Sekitar lima tentara yang berjaga khusus di rumah tahanan itu juga siap menghalau siapa pun

yang mendekat. Juga ada intimidasi oleh lima anjing besar dalam kandang-kandang tepat di seberang pintu pagar kawat itu.

"Mbak dari mana? Tidak boleh masuk," kata seorang tentara penjaga itu sembari menggebing *Tempo* kembali ke luar pagar.

Suasana di luar pagar sendiri amat kontras.

Belasan anak warga kompleks asrama ada yang bermain hutsal ataupun basket. Tampak juga beberapa orang berusia paruh baya bermain tenis di lapangan sebelahnya.

Mereka semua tidak mengacuhkan rumah tahanan peninggalan Belanda yang tampak kuno, gelap, dan menatap para tamunya dengan "dingin" itu.

Nama Guntur kembali mengemuka di media setelah ada nota kesepahaman yang ditandatangani antara pimpinan KPK dan Panglima TNI. Kamis dua pekan lalu. Artinya adalah, KPK bisa meminjam rumah tahanan itu untuk para tersangka koruptor.

Sapa yang bakal dikirim ke sana? Kabar yang beredar ada kemungkinan Guntur akan digunakan untuk menahan bekas Gubernur Akademi Kepolisian Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Djoko, pada "Jumat keramat" ini, rencananya dipertika sebagai tersangka.

"Saya tidak tahu. KPK yang mengurus teknis persiapan tahananannya, kami hanya sediakan tempatnya," kata Adrian. ● *andi isawan*

9

SENIN

1 OKTOBER 2012

EDISI NO. 4012

TAHAP XII

40 HALAMAN

RP 3.000

(LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM)

KPK

DILEMAHKAN ISTANA DINILAI ABAI



JAKARTA.- Sejumlah plakat menyal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono abai terhadap gerakan beberapa lembaga yang berupaya menegakkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia Yenti Ganarsh, mengatakan sikap abai itu terlihat dari adanya Presiden atas sejumlah gempuran yang mendera KPK. "Dia ikut andil membiarkan semuanya kacau dan tak menentu," kata Yenti kepada Tempo kemari.

Menurut Yenti, upaya memahankan KPK akan kuat setelah polisi ngotot ikut mengusut kasus dugaan korupsi proyek simulator pembuatan surat izin mengemudi. Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.

Bentuk pelemanan itu, kata Yenti, terasat polisi memark 20 penyidik yang tugas di KPK. Direktur Eksekutif Indonesia Business Center, Arief Nur Alam, mengatakan pelemanan KPK juga dilakukan yaitu dengan menolak pembang gedung, membatalkan Badan Peme-
Kewangan mengaudit kinerja KPK, memonsani kewenangan KPK dalam si Undang-Undang KPK.

Anehnya, kata Arief Yudhoyono sel-
Kena Dewan Pembina Demokrat, saja melihat anggotanya di DPR, dukung pelemanan itu. "Dia sehati-
memerintahkan anggotanya memper-
KPK."

Pengamat hukum dari Masyarakat Pemantau Peradilan Universitas Indor Choky Ramadhan, menilai sikap Presiden itu kontraproduktif de-
pemberantasan korupsi. "Yang senang duntungkan ya, koruptor," katanya. Adapun pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Andi Han mengatakan Presiden seharusnya m-
mulatkan Kepala Kepolisian dan J
Aging tak meneruskan kasus simu
"Kalau turun tangan melalui ana
yang berkeahi, bukan intervensi.

Kena Demokrat Bidang)
berantasan Korupsi.
Irwadi Syamsuddin mem-
tah tuduhan bahwa Pre
abai. "Sikap Presiden
negara ini berada
hukum. Mela, ikut at
hukum, katanya.

Sedangkan juru bi
kepresidenan, Julian A
Pasia mengatakan Pre
ters, mengikut per-
bangan yang terjadi
dalam negeri. Tapi Pre
belum akan mema
Kepala Kepolisian. Is
pun masih menu
proses pembinasan i
Undang-Undang
"Bagaimanapun, per-
hasaan itu bersama j
Nanti diaborasi per-
hasannya," kata Julian.

● DOK. SENIN / ANI MOGA KUNIA / IMA

ANIM DESKTOP / P

UPAYA MELEMAHKAN KPK

- Polisi mengulas kasus simulator
- Tak memperkenankan KPK themingasi
- Simulasi terencana simulator
- Menarik 20 penyidik yang berkeahi di KPK
- Menolak pemberian gedung KPK
- Menertakan Badan Pemantau Kelelahan mengaudit kinerja KPK
- Menengasi kewenangan KPK dalam terlesi
- Undang-Undang KPK

MEBEKA YANG DIERAT

alam menjalankan tugasnya, KPK beberapa kali menjerat oknum polisi dan anggota DPR yang (dituduh) melakukan korupsi. Beberapa di antaranya sudah dihiut.

- 1. INEPENTUR JENDERAL
Djoko Susilo
Kasus: Suap proyek simulator
Status: Tersangka
- 2. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 3. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 4. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 5. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 6. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 7. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 8. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 9. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 10. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 11. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 12. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 13. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 14. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 15. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 16. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 17. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 18. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 19. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 20. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 21. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 22. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 23. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 24. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 25. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 26. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 27. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 28. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 29. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 30. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 31. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 32. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 33. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 34. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 35. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 36. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 37. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 38. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 39. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 40. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 41. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 42. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 43. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 44. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 45. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 46. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 47. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 48. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 49. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 50. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 51. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 52. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 53. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 54. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 55. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 56. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 57. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 58. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 59. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 60. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 61. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 62. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 63. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 64. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 65. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 66. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 67. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 68. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 69. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 70. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 71. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 72. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 73. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 74. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 75. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 76. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 77. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 78. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 79. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 80. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 81. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 82. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 83. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 84. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 85. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 86. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 87. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 88. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 89. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 90. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 91. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 92. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 93. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 94. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

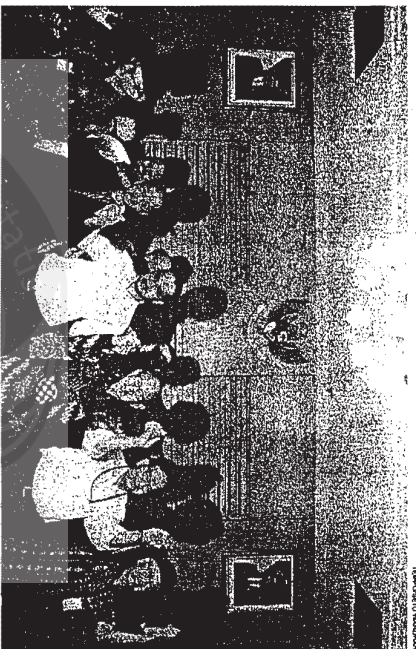
- 95. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 96. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 97. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 98. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

- 99. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka
- 100. JENDERAL JENDERAL
Djoko Purnomo
Kasus: Suap proyek
Status: Tersangka

①

Koran TEMPO, Selasa 2 Oktober 2012



Dukung KPK

Pimpinan KPK, Atsaham Samad (tiga kiri), Busyro Muqoddas (dua kiri), dan Bambang Widjoanto (tuh belakang), saat konferensi pers bersama sejumlah tokoh di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kemarin. Para tokoh, antara lain, Nathan Setiabudi, Taufik Ismail, Bambang Harjono, Hikmahanto Juwana, J.E. Sahetapy, Komarudin Hidayat, dan Saifuddin Wahid memberikan dukungan terhadap KPK untuk melawan upaya pemerkaran KPK.

Khlayak Sokong KPK Lewat Media Sosial

JAKARTA — Dukungan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi tak hanya mengalir dari para tokoh yang mengunjungl markas komisi antikorupsi. Di dunia maya pun dukungan terhadap KPK bergulir hingga semalam, situs *hashtrocking.com* mencatat pembicaraan bertopik #saveKPK dalam jejaring sosial Twitter sudah diikuti oleh 144.182 orang dalam 24 jam.

Addie mengaku dukungannya terhadap KPK "KPK mungkin tak sempurna. Tapi siapa lagi yang bisa kita harapkan selain KPK?" katanya saat dihubungi *Tempo*, kemarin. Pendiri *Twitter Orchestra* ini prihatin karena upaya melancarkan KPK semakin kencang setelah muncul kasus simulator ujian pembuatan surat izin mengemudi.

Ada juga suara sumbang seperti diluncurkan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, melalui akun @FahriHamzah di Twitter "Orang-orang suci akhir zaman itu tak ada lagi di lembaga agama, tetapi adanya di KPK. Bagaimana kalau kita ganti pimpinan semua lembaga tinggi negara dari pimpinan KPK saja?"

Fahri yang mengaku akun ini miliknya mengatakan tak jadi masalah disebut pro-korupsi. "Ini merupakan kritik saya terhadap KPK," kata Wakil Ketua Komisi Keunggulan DPR ini. Hanya, nada miring seperti itu tenggelam oleh hiruk-pikuk dukungan terhadap KPK. Situs *wuu-gang* petisi dukungan bertajuk "Serahkan Penyidik dan Kasus Korupsi SIM ke KPK".

Beberapa pelopornya adalah aktivis antikorupsi, seperti Anita Wahid, Peter Maedki, rohanawan Benny Suseyo, dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar. Hampir 6.000 dukungan mengalir untuk KPK melalui situs ini. Salah satu pendukung, Slamet S Nurhendarto asal Semarang, misalnya, dalam ia KPK lebih jujur dalam menertkas kasus korupsi.

• TEMPO (24 OKT) / KM

JEMPUT PENYIDIK DI KPK

Polisi Dinilai Arogan

"Menangkap itu tugas, kewajiban, dan tanggung jawab provos," kata Nanan.

JAKARTA — Indonesia Police Watch, pegiat pemantau kepolisian, menilai Markas Besar Kepolisian RI arogan karena mengancam penyidik yang mem-
menjerup paksa lima

lib bertahan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane, seharusnya Kepolisian lebih arti bertindak. "Ibu bentuk arogan. Seharusnya tak perlu sampai mengancam seperti itu," ujar Neta saat dihubungi kemarin. Ini berawal dari sikap

lima penyidik Kepolisian yang memilih bertahan di KPK. Lima penyidik itu adalah bagian dari 20 penyidik yang ditarik oleh Polri pada awal September lalu. Kelimanya telah habis masa tugasnya pada 12 September lalu. Polri sendiri sudah memberi ultimatum agar kelimanya segera melapor jika memilih bertahan di KPK. Mereka diberi batas waktu hingga Rabu, 10 Oktober 2012.

Wakil Kepala Kepolisian RI Komaris Jenderal Nanan Soekarna mengatakan para penyidik yang bertahan—terutama lima penyidik yang belum kembali—dinilai melakukan deersi. Para penyidik ini dinilai tidak taat pada perintah pimpinan dan tidak setia pada penugasan. "Secepat mungkin ditahan," kata Nanan saat

diemui di Mabes Polri kemarin.

Nanan menegaskan, provos berkewajiban menangkap dan menjemput paksa para penyidik yang bertahan di KPK. "Menangkap itu tugas, kewajiban, dan tanggung jawab provos," katanya. Dia menegaskan ada ketentuan batas seorang polisi untuk melaporan diri dalam 30 hari sesudah masa tugasnya berakhir. Khusus pada lima penyidik yang bertahan di KPK, Polri mengklaim belum menerima laporan dari mereka sejak Kapoti memutuskan tidak memperpanjang masa tugasnya. Neta menilai, lima penyidik yang bertahan di KPK memang bisa dinilai membangkang oleh korpsnya karena tidak taat perintah. Tapi, kata Neta, hal yang sebetulnya dilakukan Polri

adalah memberi peringatan, meminta mereka mengundurkan diri, atau melakukan sidang etik terhadap kelimanya. "Keputusan lima penyidik seharusnya tidak disikapi emosional oleh Mabes," kata Neta. Keputusan kelima penyidik untuk bertahan di KPK, menurut Neta, justru seharusnya membuat Polri introspeksi.

Nanan menambahkan, Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri akan melihat semua catatan peristiwa pelanggaran ini. Keputusan menindak dengan menangkap, kata Nanan, bukan bentuk pengantaraan terhadap anggota Propan di Institusi Polri. "Propan harus menegakkan aturan dan kode etik kepolisian," katanya.

• ISMA SWATI / RAMSBO RESMAN

Tokoh masyarakat berdatangan mendukung KPK.

JAKARTA — Hanya berselang beberapa jam setelah Inspektur Jenderal Djoko Susilo meninggalkan gedung KPK, sejumlah polisi mendampingi kantor komisi antirasis di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, itu. Sekitar pukul 22.00 tadi malam, aparat kepolisian berpakaian preman dan berseragam Provost tiba di gedung KPK.

Mereka yang berjumlah sekitar 50 orang itu hendak menangkap Novel Baswedan, penyidik KPK. Novel merupakan penyidik dari kepolisian yang bertugas di KPK, namun belum berakhir masa tugasnya. "Surat penangkapan atas nama saya, polisi sudah ada di bawah (gedung KPK)," kata Novel ketika memberi konfirmasi.

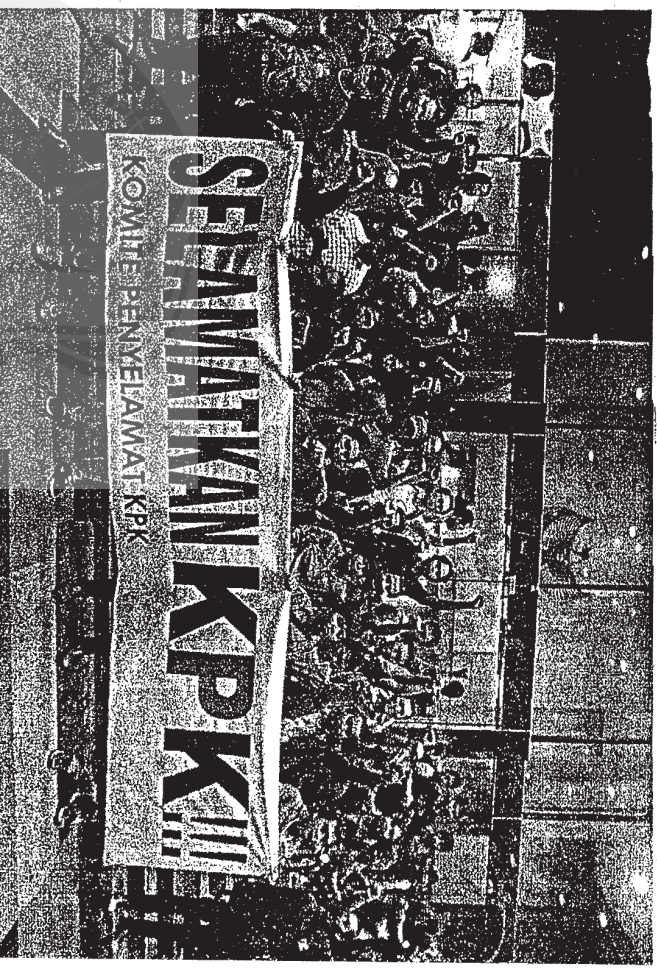
Suasana tampak memekam. Sebagian polisi berpakaian preman itu berjaja di depan kantor dan pintu masuk KPK. Mereka juga menyebar ke ruang bagian dalam KPK. Aksi ini merupakan upaya mengirimkan penyidik KPK Novel, yang sebelumnya bertugas di Pors Bengkulu, dijera kasus lama yang terjadi pada 2004.

Kepala Divisi Humas Martas Besar Polri Brigadir Jenderal Polisi Suhardi Alus membenarkan adanya sejumlah aparat kepolisian dari Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya yang akan menangkap Novel atas dasar kasus penganiayaan terhadap enam orang di Bengkulu. Berdasarkan laporan Divisi Kriminal Umum Polda Bengkulu, terdapat enam orang yang menjadi korban pembunuhan," kata dia. "Salah di antaranya meninggal dunia."

Rumah Novel di Jalan Kelapa Puan Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, juga didatangi polisi. "Ya benar dikandung," kata Taufik Baswedan, kakak kandung Novel, kemarin.

Tadi malam puluhan aktivis anti-korupsi berdatangan ke KPK. Mereka meneman tahu apa yang sedang terjadi terhadap penyidik KPK. Mengingat, isu bahwa KPK "diduduki" polisi menarik bender di media sosial Facebook dan Twitter. Beberapa tokoh juga datang, seperti Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Goenawan Mohamad, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. "Ini upaya menenangkan KPK," kata Anies.

Adapun Ketua KPK Abraham Samad dan dua walisnya, yaitu Zulharnain dan Bambang Widjojanto, menggalang pertemuan di lantai tiga gedung KPK. Abraham sebelumnya berada di Makassar, sedangkan Bambang di Samarinda. Dua hari lalu, Wakil Ketua KPK Busyro Mulgoddas mengatakan ada lima penyidik yang memilih bertahan di KPK. Selain berlatiknya Busyro mengatakan sudah mengangkat 28



KONELIK POLRI KPK MEMANAS

POLISI KRIMINALKAN PENYIDIK KPK

penyidik dari kepolisian yang menjadi pegawai tetap KPK.

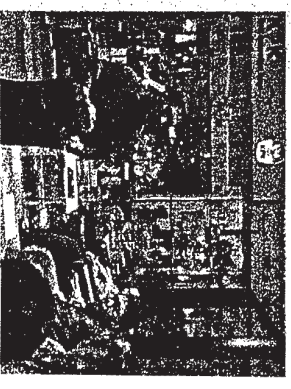
Sekelompok, pada 14 September lalu, Polri menyatakan tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK. Sebanyak 15 orang memilih pulang ke Mabes Polri.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meng-

aku telah berkomunikasi dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo linval pengguguran kantor KPK oleh anggota Provost. "Saya meminta Kapoti menarik (Provost) dari KPK. Kapoti bilang tidak ada instruksi untuk menurunkan Provost ke KPK," kata Djoko.

• ANAS SUPRI (ANAS) MENANGGIL ISU SUKRI

MAKASSAR 1 OKT 12



Atas dari berbagai lembaga swadaya masyarakat mendalang ke ter NK untuk memastikan idukannya kepada lembaga antiras itu tadi malam. Mereka mengulit tindakan Polri yang menentang kepentingan institusi, bukan kepentingan negara (atas). Puluhan sendi kepolisian berpakaian preman menyebar di kantor KPK. Mer barmaksud menangkap Komandan Besar Novel Baswedan, penyidi KPR (bawah).

Dukungan bagi KPK Bermunculan di Daerah

Pembicaraan #saveKPK di Twitter sudah diikuti 1.462.116 orang dalam 24 jam terakhir.

JAKARTA — Aksi polisi yang menda-tangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat malam lalu, justru semakin menguatkan dukun-gan kepada komisi antirasuah itu. Sepanjang kemarin, dukungan datang dari mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, partai poli-tik, hingga masyarakat umum. Sebaliknya, kecaman terhadap polisi terus mengental.

Di Bandung, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot jabatan

Kepala Polri dari Jenderal Timur Pradopo. Presiden Mahasiswa Unpar Andrew Ryan Sinaga dalam orasinya mengatakan Timur ber-tanggung jawab atas penggeru-dukkan kantor KPK oleh aparat Kepolisian Daerah Bengkulu, Polda Metro Jaya, dan Markas Besar Polri dua hari lalu.

Mahasiswa menilai Timur ikut bersalah karena membiarkan anak buahnya berupaya menangkap penyidik senior KPK, Komisaris Novel Baswedan. Upaya jemput paksa polisi digagalkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojanto. Alasan penangkapan Novel juga dini-lai terlalu mengada-ada. "Copot Kapolri karena tak punya iktikad baik dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.

Desakan mencopot Kapolri juga disuarakan puluhan aktivis Perggerakan Mahasiswa Islam

Indonesia Universitas Kanjuruhan Malang. Tindakan polisi tersebut dinilai mencederai hukum dan semakin menunjukkan kebobrokan kepolisian. Mahasiswa juga meng-gelar pembacaan tablib dan doa bersama untuk KPK. "Save KPK! Kami, rakyat Indonesia, di bela-kang KPK," teriak peserta.

Di Yogyakarta, puluhan orang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM melakukan aksi keprihatin-an di bundaran UGM. Koordinator kebijakan eksternal BEM KM UGM, Ahmad Rizky, yang memimpin aksi, mendesak Presiden mengambil lang-kah untuk membantu KPK. "Kami menyeru semua pendukung gerakan antikorupsi untuk segera memberi-kan solidaritasnya," kata dia.

Aksi juga berlangsung di Banda Aceh. Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) mempraktasai peng-alangan dukungan masyarakat



Ketua KPK Abraham Samad (kanan) berbincang dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. di kantor Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Semarang, kemarin.

Aceh melalui Petisi Masyarakat Aceh Save KPK. Koordinator Mata, Alfian, mengatakan petisi ini seba-gai dukungan masyarakat Aceh akan pentingnya keberadaan KPK. "Kami juga meminta 17 wakil Aceh di Senayan bersuara dan melaku-kan kerja nyata menolak setiap upaya skenario pelumpuhan KPK." Selain berbentuk aksi, dukun-gan ramai mengalir di dunia maya. Hinggasemalam, situs Hashtracking.com mencatat pembicaraan berto-pik #saveKPK dalam situs jejaring

sosial Twitter sudah diikuti oleh 1.462.116 orang dalam 24 jam.

Situs www.change.org bahkan menggalang petisi dukungan ber-tajuk "Serahkan Kasus Korupsi Polri ke KPK! Hentikan Pelemahan KPK!". Petisi yang dimotori akti-vis antikorupsi Anita Wahid, Teten Masduki, rohaniwan Benny Susetyo, dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar ini sudah didukung sekitar 9.238 orang.

● ANANTA BADIKI | EKO WIDAMITO | ADDI MAHARUBIK KHOMI | AIN WARSIDI | RAJAY FEBRIAN



KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Tampak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (kanan) dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (tengah) sesuai melakukan pertemuan tertutup di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (31/7). Pertemuan itu terkait penetapan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan alat simulasi pembuat SIM di Korps Lalu Lintas Polri tahun 2011 dengan tersangka DS oleh KPK.

KORUPSI ALAT SIMULASI

Ditahan Lebih dari 24 Jam

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas baru saja tiba di kediamannya, Senin (30/7) pukul 23.00. Tiba-tiba anak buahnya menelepon, mengabarkan kegentingan.

Petugas KPK yang tengah menggeledah Markas Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta, dihadap beberapa petugas Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi.

Pengeledahan seharusnya mudah. Sekitar 30 petugas KPK dengan enam mobil tiba sejak pukul 16.00. Semua lancar. Petugas jaga di Korlantas mempersilakan pegawai KPK menggeledah beberapa tempat dan menunjukkan tempat penyimpanan arsip ke petugas KPK.

Pukul 22.00, upaya penggeledahan KPK terhenti. Sejumlah perwira Bareskrim Mabes Polri membawa anak buahnya datang. Setidaknya ada dua perwira berpangkat komisaris besar yang

datang. Mereka menanyakan upaya penggeledahan KPK.

Suasana sangat tegang. Perwira Bareskrim menanyakan izin dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Tak kalah gertak, petugas KPK menunjukkan surat penetapan pengadilan terkait izin penggeledahan.

Tak mau kalah, perwira Bareskrim itu meminta dilakukan gelar perkara di tempat dan minta KPK menunjukkan bukti korupsi. KPK menolak gelar perkara di tempat. Ketegangan meningkat. Bareskrim minta KPK tidak menggeledah.

Saat itu, petugas KPK menelepon pimpinan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto baru tiba di rumahnya, Depok, Jawa Barat, sekitar pukul 23.00 ketika teleponnya berdering. "Ada emergency call dari lapangan," ujar Bambang.

Busyro, Bambang, dan Ketua

KPK Abraham Samad yang juga ditelepon malam itu langsung kembali ke KPK. Ketiganya, ditemani Direktur Penuntutan dan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Warih Sadono beserta Direktur Penyelidikan Arsy, langsung menuju Korlantas.

Tiba pukul 24.00 di Korlantas, mereka mendapati Kabareskrim Komisaris Jenderal Sutarmam. Pembicaraan tak mulus. Muncul perdebatan. Masing-masing tetap pada pendiriannya. Mabes Polri mengemukakan tengah menyelidiki kasus yang sama.

Tak boleh menggeledah

Pembicaraan tiga pimpinan KPK dengan Kabareskrim berakhir pukul 03.30. Selama pembicaraan itu, petugas KPK tak boleh menggeledah. Semua petugas KPK yang semula menggeledah berkumpul di lobi Korlantas. Sebagian berusaha terjaga menahan kantuk. Nasi dengan sepotong ayam yang dipesan dan sudah datang untuk sahur terasa hambar.

Tak lama kemudian, terdengar azan subuh. Pimpinan

KPK bersama jajaran Kabareskrim shalat subuh di masjid belakang Korlantas. Ketegangan mulai cair. Penggeledahan boleh kembali dilakukan.

Pukul 07.30 penggeledahan selesai. Seluruh barang bukti tetap dikumpulkan di Korlantas. Menurut Bambang, Kabareskrim membantu menyediakan ruangan di Korlantas untuk menyimpan barang bukti dan di-segel. Petugas KPK menda barang bukti dan membuat berita acara penggeledahan.

Bambang ditemani Juru Bicara KPK Johan Budi SP kembali ke KPK. Didampingi Kepala Biro Perierangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar, Johan menggelar jumpa pers mengumumkan, Gubernur Akademi Kepolisian Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka. Sebelumnya, Djoko menjabat Kepala Korlantas Mabes Polri.

Johan mengumumkan, barang bukti yang disimpan di Korlantas bisa dibawa ke KPK. Siang harinya, pimpinan KPK akan bertemu Kapolri di Mabes Polri.

Kesepakatan pagi itu tak semudah yang dibayangkan. Hingga siang, petugas KPK belum diizinkan meninggalkan Korlantas untuk membawa barang bukti. Dalam jumpa pers sore harinya, Johan menyatakan, barang bukti masih tertahan dan belum diizinkan dibawa keluar.

Kabar gembira didapat sesuai buka puasa. KPK boleh membawa barang bukti dari Korlantas. "Kami sangat berterima kasih karena Kapolri memahami bahwa penyidikan KPK sangat dibatasi waktu sehingga barang-barang bukti yang kami perlukan diizinkan untuk segera dibawa ke KPK," kata Bambang.

KPK mengizinkan Mabes Polri menggunakan barang bukti yang telah disita untuk kepentingan penyelidikan mereka. Disepakati pula KPK akan menyidik tersangka Djoko dan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan alat simulasi. Polri akan menangani panitia pengadaannya. Untuk sementara, jalan berani dan penuh risiko penyidik KPK lapang. Dukungan kuat masyarakat ada di belakang dan siap digalang. (KHAERUDIN)

Berlari Lebih Cepat, KPK Mencium Jejak Jenderal

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri tiba-tiba mencuat. Puluhan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Korlantas sejak Senin (30/7) sore.

Jenderal polisi bintang dua, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Gubernur Akademi Kepolisian, dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Juli 2012.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, hingga 27 Juli lalu, KPK secara resmi menaikan kasusnya ke tingkat penyidikan dan menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka (*Kompas*, 1/8).

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi tersebut sebenarnya bukan kasus baru. Aparat kepolisian pernah menangani kasus sengketa tender dalam pengadaan alat simulasi mengemudi tersebut.

Sengketa tender itu terkait PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai pemenang tender dan PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) sebagai sub-kontraktor. PT ITI dinilai tidak dapat memenuhi permintaan barang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, Polri menghormati apa yang tengah dilakukan KPK.

Tentu dalam konteks tugas yang dilakukan KPK, kami ingin sampaikan bahwa Polri adalah mitra yang sejajar dalam konteks pemberantasan korupsi. Kami sepenuhnya mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK," kata Boy.

Dalam jumpa pers di KPK, Selasa (31/7), Boy mengakui beberapa waktu lalu pernah mengumumkan belum ditemukan unsur pidana kasus itu. Berdasarkan temuan Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri saat itu, proses pengadaan alat simulasi berjalan normal.

Menurut Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Sutarnan, Bareskrim juga sedang menyelektir kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi itu. Bareskrim memang terkesan agak lama menangani karena Bareskrim beranjak pada pemeriksaan tersangka dari level bawah, seperti pimpinan proyek atau pejabat pembuat komitmen, dan bisa mengarah pada pejabat yang lebih tinggi. "Kalau KPK lebih fokus pada penyelenggara negara," katanya.

Sayangnya, Bareskrim kurang "jeli" mendalami lebih lanjut kasus terkait sengketa tender itu. Ternyata, di balik kasus sengketa tender itu terdapat dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan perwira tinggi Polri. Barat hari 100 meter, Bareskrim Polri kalah cepat dengan KPK.

KPK mampu mencium tersangka lain yang diduga terlibat, yaitu Djoko Susilo. Upaya penggeledahan kantor Korlantas pun

mengentakkan banyak orang ketika tidak berjalan mulus. Kini, kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korlantas Djoko Susilo itu pun "meluncur" ke KPK. Tinggal menunggu KPK memeriksa Djoko Susilo.

Nilai proyek

Dugaan kasus korupsi yang melilit Djoko saat ini memang tidak kecil. Nilai proyek pengadaan alat simulator mengemudi untuk pembuatan SIM itu mencapai Rp 198,7 miliar pada tahun anggaran 2011.

Rinciannya, menurut Sutarnan, nilai proyek pengadaan alat simulator mengemudi untuk kendaraan roda empat sebesar Rp 143,4 miliar dan nilai proyek pengadaan alat simulator mengemudi untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 55,3 miliar. Kebanyakan Korlantas Polri terhadap alat simulasi mengemudi untuk kendaraan roda dua sebanyak 1.126 unit dan sebanyak 880 unit untuk roda empat pada tahun 2011.

Namun, realisasi pengadaan alat simulasi mengemudi untuk kendaraan roda dua tahun 2011 hanya sebanyak 700 unit dan realisasi pengadaan alat simulasi mengemudi untuk kendaraan roda empat hanya sebanyak 556 unit.

6

lbarat hari 100 meter, Bareskrim Polri kalah cepat dengan KPK.

Berapa besar pengeluaran (*mark up*) harga dalam kasus itu? Johan Budi belum mengetahui pasti. Sebagai perbandingan saja, dari beberapa situs, harga alat simulasi mengemudi 2.000 dollar AS-5.000 dollar AS (hampir Rp 20 juta-Rp 50 juta). Dengan asumsi harga satu unit Rp 50 juta, dan realisasi pembelian sebanyak 1.256 unit tahun 2011, nilai pembelian sekitar Rp 61 miliar. Jadi jauh lebih rendah dari nilai proyek Rp 198,7 miliar.

Apakah alat simulasi mengemudi itu betul-betul diperlukan? Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Puji Hartanto mengungkapkan, alat simulasi mengemudi sangat penting. "Di luar negeri, alat seperti itu sudah digunakan," katanya.

Menurut Puji, tahun 2012 ini Korlantas masih merencanakan pengadaan alat simulasi tersebut. Alat simulasi itu juga direncanakan untuk menguji kemampuan polisi dalam mengemudikan kendaraan patroli di jalan-jalan raya.

(FERRY SANTOSO)

Kompas, Kamis 2 Agustus 2012

kompas, Jumat 3 Agustus 2012

© kesekelompokan pto korhna

Sesuai UU, KPK Lebih Berhak

Presiden Harus Dorong Polisi Serahkan Kasus

JAKARTA, KOMPAS — Polri seharusnya menyerahkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika KPK telah menangani kasus korupsi, kepolisian dan kejaksaan tak lagi berwenang menyidik kasus yang sama.

Kewenangan KPK tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 50 Ayat 1, 3, dan 4 sudah jelas bahwa KPK lebih dulu melakukan penyidikan. Ayat 3 menyebutkan, "Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan." Pasal 4 menegaskan, "Dalam hal penyidikan dilakukan



secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Persilangan atau kesamaan polisi tidak ingin menyerahkan penyidikan kasus itu kepada KPK yang telah menangkap dua jenderal, yaitu Iren Djoko Susilo dan Brigjen (Poj) Didik Purnomo sebagai tersangka, maka terlihat setelah kepolisian ju-

ga menetapkan lima tersangka.

Atas nama UU, KPK pun mengimbau Polri menyerahkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM itu untuk membantu dan mendukung KPK.

"Kalau kamu ingin patuh pada undang-undang, seandainya institusi lain membantu, men-

support KPK. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pada Pasal 50 Ayat 1, 3, dan 4 sudah jelas di situ dimaksudkan bahwa KPK lebih dulu melakukan penyidikan. Fungsi institusi lain bekerja sama membantu KPK," kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Kamis (2/8).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK telah menetapkan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator

(Bersambung ke hal 15 kol 1-5)

DASAR HUKUM KASUS KORUPSI DIAMBIL ALIH KPK

Pasal 8 Ayat (2)
KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 8 Ayat (3)
Keputusan atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperoleh dalam waktu paling lama 14 hari kerja, dihitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.

Pasal 9
Pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK dengan asas: a. tidak mengenai tindak pidana korupsi tidak ditundakan; b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berturut-turut atau bertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang bersangkutan; d. penanganan penanganan tindak pidana korupsi meniadakan unsur korupsi; e. penanganan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; f. keadaan lain yang menuntut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan; g. penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

PARA TERSANGKA VERSI KPK DAN POLRI

- Tersangka versi KPK**
1. Iren Djoko Susilo (Mantan Kepala Korlantas Polri)
 2. Brigjen (Poj) Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas Polri, pejabat pembuat komitmen proyek)
 3. Brigjen Susanto (Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, rekanan proyek)
 4. Sudeco S Bambang (Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia, rekanan proyek)

- Tersangka versi Polri**
1. Brigjen (Poj) DP
 2. AKBP TR
 3. Kompol LGM
 4. BS (Pihak penengah tender)
 5. SB (Pihak pemenang tender)



Djoko Susilo

Sumber: Utusan, "Tindakan" 7/08, dan pemerintahan "Kompas" dan UU No 30/2002 tentang KPK

BESTARI

ITOMPAS, Senin, 6 Agustus 2012

Undang-Undang KPK Diuji di MK

Keteguhan Polisi Tidak Terlalu Salah

JAKARTA, KOMPAS — Sebagai wujud dukungan agar kasus dugaan korupsi simulator di Korps Lalu Lintas Polri disidk Komisi Pemberantasan Korupsi, Habiburrahman, Munathsir Mustaman, dan Ma'uana Bungaran mendaftarkan permohonan uji materiil Undang-Undang KPK.

Rencananya, uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Senin (6/8).

Kami merasa situasi ini tak bagus. Masih banyak pihak yang dengan pendiriannya. Karena itu, kami ingin MK menanggapi Pasal 50 Ayat (3) UU KPK. Dengan putusan MK itu, tak akan lagi ada celah bagi polisi atau juga nanti jaksa menyidk kasus yang sudah disidk KPK," ujar Habiburrahman di Jakarta kemarin.

Habiburrahman bersama dua rekan sesama advokat, mengemukakan, kasus penyidikan ganda perkara dugaan korupsi simulator mengemudi adalah preceden buruk bagi penegakan hukum. "Satu-satunya pihak yang paling diuntungkan dari pertikaian antara KPK dan Polri adalah para koruptor yang tidak ingin perbuatannya merampok keuangan negara terpompak," ujarnya.

Menurut dia, dalam konteks logika hukum, pengusutan kasus ini akan lebih baik jika dilakukan KPK. Akan sulit bagi penyidik Polri untuk dapat bersikap independen dan terhindar dari intervensi ketika menyidk perkara yang terjadi di lingkungan mereka.

Namun, dalam konteks legalitas, keteguhan sikap Polri untuk menyidk perkara ini, menurut Habiburrahman, tidak terlalu salah. Rumusan Pasal 50 Ayat (3) UU No 30/2002 tidak terlalu jelas mengupayakan kewenangan penyidikan Polri dalam perkara yang sudah disidk KPK.

Pasal itu berbunyi, "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan."

Sayangnya, dalam frasa tersebut tidak ada keterangan mengenai kewenangan kepolisian dan Kejaksaan dalam UU apa yang menjadi halang ketika KPK sudah menyidk," ujar Habiburrahman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, jika Presiden tak kunjung bertindak atas konflik antara polisi dan KPK, masyarakat bisa menggunakan gugatan ke MK. Masyarakat bisa meminta MK untuk menguji UU KPK.

Langkah tersebut, menurut Lukman, merupakan upaya beradab dalam negara hukum agar ada kepastian.

Berbeda dengan Lukman, Tagi Riyanto V Jhonny, Wakil Ketua MPR, justru mengungkapkan agar kedua lembaga tersebut tetap sama-sama menangani kasus korupsi Korlantas. Bantakan kedua institusi penegak hukum itu berkolaborasi hanya menangani kasus dugaan korupsi Korlantas, katanya.

Menturut Haryanto, pejabat secara legal-formal mengenai siapa yang paling berwenang menangani kasus tersebut, juga tetap tidak ada ujungnya. Perdebatan ini dikawatirkan hanya akan menguras energi sehingga substansi pemerintahan, yaitu pemberantasan korupsi, terbelengkalai (GNT/NTA)

sebut tidak ada keterangan mengenai kewenangan kepolisian dan Kejaksaan dalam UU apa yang menjadi halang ketika KPK sudah menyidk," ujar Habiburrahman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, jika Presiden tak kunjung bertindak atas konflik antara polisi dan KPK, masyarakat bisa menggunakan gugatan ke MK. Masyarakat bisa meminta MK untuk menguji UU KPK.

Langkah tersebut, menurut Lukman, merupakan upaya beradab dalam negara hukum agar ada kepastian.

Berbeda dengan Lukman, Tagi Riyanto V Jhonny, Wakil Ketua MPR, justru mengungkapkan agar kedua lembaga tersebut tetap sama-sama menangani kasus korupsi Korlantas. Bantakan kedua institusi penegak hukum itu berkolaborasi hanya menangani kasus dugaan korupsi Korlantas, katanya.

Menturut Haryanto, pejabat secara legal-formal mengenai siapa yang paling berwenang menangani kasus tersebut, juga tetap tidak ada ujungnya. Perdebatan ini dikawatirkan hanya akan menguras energi sehingga substansi pemerintahan, yaitu pemberantasan korupsi, terbelengkalai (GNT/NTA)

Menghitung Peluang di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi lagi-lagi "dipaksa" terlibat dalam menyelesaikan konflik/sengketa kewenangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengaduan alat simulasi SIM yang kini "dipebutkan" Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Akibatnya rezim ini lebih suka membawa persoalan tersebut ke pengadilan daripada menyelesaikan melalui jalur yang lebih elegan jika saja Presiden bersedia "campur tangan"—dalam makna yang positif.

Tiga pengacara yang menamakan diri Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Senin (6/8) lalu, mendaftarkan uji materi Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang KPK ke MK. SPR meminta MK memberi tafsir terhadap pasal tersebut, khususnya frasa "kepolisian atau kekuasaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan". Pasal tersebut mengatur bahwa ketika KPK sudah memulai penyidikan, institusi penegak hukum lain tidak boleh menyidik untuk kasus yang sama.

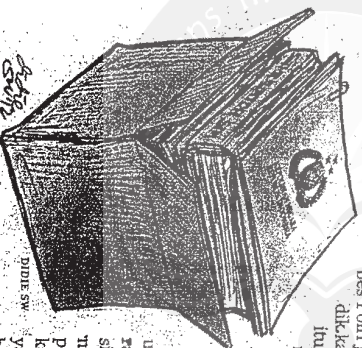
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fajrul Falah, Selasa (7/8), mengatakan, di ilmu hukum ada asas *lex posterior derogat legi priori*, yang artinya hukum yang terbaru (*posteror*) mengesampingkan hukum yang lama. Dalam kasus ini, UU KPK yang terbit pada 2002 mengalahkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981, sepanjang terkait penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, juga ada asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang umum.

Kalau kasus pencurian alat simulasi SIM, itu jelas kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan. Tetapi, kalau perkara tindak pidana korupsi, ya kewenangan KPK," katanya.

Hukum positif dan ilmu hukum terkait kasus tersebut sebenarnya sudah jelas. Sehingga, persoalan sengketa kewenangan penyidikan alat simulasi SIM tersebut sebenarnya bukan lagi masalah hukum *an sich*, tetapi juga berkaitan dengan politik antar lembaga penegak hukum.

Fajrul menyebutkan terdapat semacam gengsi dari institusi kepolisian ketika tiba-tiba KPK masuk menangani kasus tersebut, sementara Bareskrim, Mabes Polri juga tengah menyidik kasus tersebut. Karena itu, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan internal oleh kedua lembaga.

Jika kurang yakin, Fajrul menyarankan KPK atau Polri ke MK untuk memperoleh rambu-rambu penafsiran. KPK tidak bisa menggantungkan diri pada uji materi SPR karena interpretasi yang digunakan SPR bisa saja tidak sesuai kepentingan KPK.



POLE SW

kepentingan KPK

Hal serupa juga diungkapkan pakar hukum tata negara, Margarito Karnis. Ia bahkan memprediksi, uji materi SPR bakal rontok sebelum masuk ke sidang utama (pleno). Tiga pengacara SPR itu dinilai tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk menguji Pasal 50 Ayat (3) UU KPK. MK akan mempertanyakan kerugian konstitusional baik faktual maupun potensial yang dialami ketiga pengacara itu dengan penerapan Pasal 50 Ayat (3).

Kedua pakar hukum tata negara itu menyarankan agar KPK membawa persoalan tersebut ke MK. Ada dua pintu yang bisa digunakan, yaitu sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) dan uji materi UU KPK. Bisa tidaknya penggunaan jalur SKLN memang masih jadi perdebatan sebab SKLN hanya dapat diajukan oleh lembaga negara yang disebut di dalam UUD 1945, dan kewenangannya pun diberikan langsung oleh UUD. KPK tidak disebut di dalam UUD dan kewenangannya murni bersumber pada UU.

Namun, menurut Margarito, SKLN bisa saja dilakukan bila Polri yang mengajukan sebab Polri disebut di UUD. "Menurut saya bisa saja sengketa diajukan oleh satu saja LN yang disebut di UUD, sementara yang lain cukup di UU," kata Margarito. Pintu masuk yang paling memungkinkan adalah uji materi UU KPK. Fajrul mengatakan, KPK bisa meminta tafsir Pasal 50 Ayat (3) UU KPK yang kini ditafsir secara berbeda oleh KPK dan Polri.

Margarito menyarankan agar KPK atau Polri menguji materi ketentuan mengenai supervisi atau pengambilan perkara oleh KPK atau bisa juga dipersoalkan mengenai terminologi siapa yang sudah dituduh menyidik.

"Konteks norma 'lebih dahulu' menyidik itu bagus untuk diuji ke MK. Konsep mengenai siapa yang terlebih dahulu itu sebenarnya seperti apa," ujar Margarito.

KOMPAS, Kamis 9 Agustus 2012

Publik Hargai KPK

Samad: Belum Ada Kesepakatan antara KPK dan Polri

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah tokoh masyarakat sipil mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (8/8), menyatakan dukungan mereka agar KPK sepenuhnya menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi berkendara roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri.

Mereka juga menyatakan akan bertemu Jaksa Agung agar kejaksaan tidak menangani penuntutan kasus ini yang disidik Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terjadi pelanggaran undang-undang.

Mereka yang hadir ke KPK antara lain mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam, mantan hakim Asep Iwan Iriawan, ahli tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih, juga aktivis sosial seperti Usman Hamid, Fadjoel Rachman, Romo Benny Susetyo, dan Effendi Ghazali. Hadir juga sejumlah pimpinan media.

Secara terpisah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oe-

Madril dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Mas-sardi juga mendukung kinerja KPK.

"Kami datang ke sini murni tanpa rekayasa karena ingin memberikan dukungan agar KPK menangani sepenuhnya kasus korupsi pengadaan alat simulasi di Korlantas Polri. KPK tidak perlu ragu untuk menyidik kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat," kata Benny.

Menurut Chairul, sepanjang pengalamannya sebagai jaksa, jika ada berkas perkara yang sama ditangani dua institusi berbeda, hal tersebut akan merusak penegakan hukum. Oleh karena itu, Jaksa Agung harus mengembalikan berkas perkara yang diajukan polisi dan memberi pe-

tunjuk agar kasus itu dilimpahkan ke KPK.

Jika polisi memaksakan menangani perkara sama yang ditangani KPK, dan dengan tersangka yang sama, menurut Chairul, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Yenti, KPK tidak perlu ragu menerapkan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi pengadaan alat simulasi itu. "Apalagi, kalau kasus ini sudah berlangsung lama, sudah tidak diragukan lagi pasti ada tindak pidana pencucian uang," kata Yenti.

Usman yang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada KPK melalui petisi [online www.change.org/se-rahkankeKPK](http://online.www.change.org/se-rahkankeKPK).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, KPK berterima kasih atas dukungan masyarakat tersebut.

Belum sepakat

Secara terpisah, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan,

belum ada kesepakatan penanganan perkara ini antara KPK dan Polri. Dia membantah bahwa sudah ada pembagian penanganan tersangka dalam kasus ini, seperti KPK menangani Inspektur Jenderal Djoko Susilo, sementara polisi menangani tersangka lainnya. "Itu hanya pilihan, opsi," katanya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, pimpinan Polri dan KPK akan terus berkoordinasi untuk menangani proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi mengemudi di Korlantas Polri itu. "Itu koordinasi lanjutan antarpimpinan," kata Boy Rafli, saat ditanya mengenai pembicaraan Abraham Samad dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Senin malam.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menepis anggapan tidak adanya kesepakatan antara pimpinan KPK dan Polri. "Ada kesepakatan, yakni untuk sementara *cooling down* dulu," ujarnya.

KOMPAS, Jumat 10 Agustus 2012

DUGAAN KORUPSI

KPK Dapat Ambil Alih Penyidikan Kasus di Korlantas

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI yang juga disidik Polri. KPK dapat melakukan itu jika menilai atau merasa alasan-alasan pengambilalihan kasus itu terpenuhi.

"Kalau KPK merasa itu (alasan-alasan pengambilalihan) ada pada polisi, ambil alih," kata pakar hukum tata negara yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra di sela-sela acara buka

puasa, di Jakarta, Kamis (9/8).

Yusril menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan KPK dapat mengambil alih kasus dugaan korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan. Alasan-alasan itu adalah laporan tidak ditindaklanjuti, ada unsur korupsi dalam penanganan korupsi, dan ada motif untuk melindungi tersangka.

Untuk mengambil alih kasus, kata mantan anggota tim perumus UU No. 30/2002, Firman Jaya Daeli, KPK berkirim surat kepada Polri dengan tembusan kepada Presiden, DPR, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

KPK juga mengumumkan kepada publik.

Di Markas TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikannya bahwa KPK dan Polri sama-sama berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Kedua lembaga itu diharapkan bekerja sama sebaik mungkin.

"KPK memiliki peran sungguh penting dan kami dukung. Polri dan kejaksaan juga menjalankan tugas. Maka, saya harapkan lakukan kolaborasi agar pemberantasan korupsi bisa berjalan baik," tutur Presiden.

Menurut Presiden, dalam acara buka puasa di Mabes Polri, Rabu, ia berbicara kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Ketua KPK Abraham Samad. "Saya katakan, baik kepada Kepala Polri maupun Ketua KPK, 'Bapak berdua adalah andalan saya, jago saya dalam perang melawan korupsi,'" ucapnya.

Presiden berharap silang pendapat antara Polri dan KPK bisa diselesaikan dengan baik, bisa dicapai kesepakatan.

Namun, Abraham mengatakan, tidak ada ucapan khusus dari Presiden dalam acara buka puasa

itu. "Tidak ada yang khusus, hanya pesan agar KPK dan Kapolri bekerja sama memberantas korupsi di negeri ini," ungkapnya.

KPK telah memeriksa lebih dari 10 saksi kasus itu. Pekan depan pemeriksaan dilanjutkan. Sementara Polri telah memeriksa tiga tersangka kasus itu, yakni Brigjen (Pol) DP, Ajun Komisaris Besar TR, dan Komisaris L.

(FER/RAY/BIL/ATO/EDN/FAJ)



Lihat Video Terkait
"KPK Vs Polri"
di vod.kompas.com/kpkvspolri

KOMPAS, Kamis 30 Agustus 2012

KASUS SIMULATOR

Empat Polisi Mangkir dari Panggilan KPK

JAKARTA, KOMPAS — Empat perwira polisi mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (29/8). Empat perwira tersebut, yaitu Ajun Komisar Besar Wicnu Budaya, Ajun Komisar Besar Wandi Rustawan, Komisar Pratih Purwaningsih, dan Komisar Ni Nyoman Sartini, tidak hadir di KPK tanpa memberikan keterangan.

"Keempatnya tak hadir tanpa memberikan keterangan. Mereka akan dipanggil ulang," kata Kepala Bagian Pembinaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. Menurut Priharsa, keempat perwira itu dipanggil dalam kapasitas sebagai panitia penyelenggaraan alat simulasi pengenalan di Korps Lalu Lintas Polisi. Surat panggilan sudah dilayangkan sejak 15 Agustus lalu.

Sedanya mereka akan dipe-

ntilisa sebagai saksi untuk terduga Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Gubernur Akademi Kepolisian nonaktif yang juga mantan Kepala Korantas Polri. KPK juga menetapkan Wadi Kepala Korantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo serta dua orang dari pihak swasta, Sukotjo Bambang dan Budi Susanto, sebagai tersangka.

Sementara itu, polisi juga menetapkan tiga nama terakdir itu sebagai tersangka meski KPK telah lebih dulu menyidik kasus ini. Keluarganya diahian polisi. Terkait hal itu, Wadi Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK berpegang pada undang-undang yang ada.

Menurut Bambang, berdasar Undang-Undang KPK, jika KPK telah menangkap suatu kasus, penegak hukum yang lain harus berhenti. "KPK berpijak pada Pa-

sal 50 Ayat 3 dan 4. Kalau sudah masuk, hendaknya penegak hukum lain menghentikan penyidikan," ujarnya.

Menurut Koordinator Kasus Masyarakat Sipil, Anri Kon Fayroel Rahman, Rabu, sikap Polri yang bersikeras menanganis dugaan korupsi pengadialat simulasi di Korantas r mungkinkan polisi melaku pembungkangan terhadap Nomor 30 Tahun 2000 tentu Komisi Pemberantasan Korupsi. "Sebanyak 60 orang yang mewakili tokoh masyarakat, intelektual, dan LSM, sebelum Lebaran bertemu pimpinan Polri dan memberikan dukungan ag KPK terus maju. Jika polisi bersikukuh, artinya polisi men bangkang UU. Kami juga tidak mendukung KPK jika tidak menandatangani UU," kata Fayroel (RAA/RIU/LOK/ANS).

KPK Siapkan Penyidik

Penarikan dari Polri Selalu Bisa Ditangguhkan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan perekrutan penyidik dari luar kepolisian. Namun, KPK masih tetap membutuhkan penyidik dari kepolisian sehingga diharapkan ada kebijakan dari pimpinan Kepolisian Negara RI untuk membantu kebutuhan KPK akan penyidik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di sela-sela rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (17/9), di Jakarta. Rapat ini juga dihadiri Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.

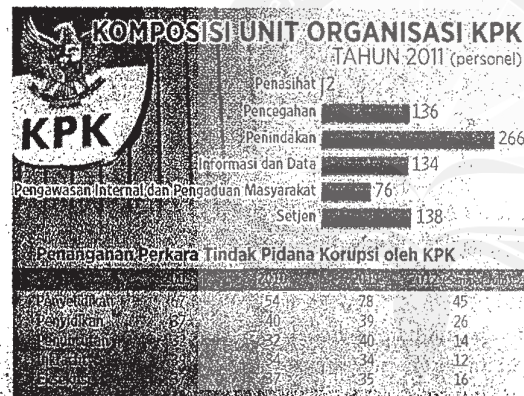
Namun, rapat itu ditutup ketika pembicaraan belum selesai dan diputuskan dilanjutkan paling lambat Minggu. Busyro harus pergi ke Aceh hingga unsur pimpinan KPK yang ada di rapat itu tinggal Zulkarnain. Tiga unsur pimpinan KPK lain, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Adnan Pandu Praja, tidak hadir karena kegiatan lain. Kondisi ini menyulitkan KPK membuat kesimpulan jika rapat dilanjutkan.

Langkah Polri menarik 20 dari

87 penyidiknya yang bertugas di KPK menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rapat itu. Penyidik yang ditarik ada yang berpangkat ajun komisaris besar. Langkah Polri ini menimbulkan sejumlah pertanyaan karena dilakukan ketika KPK sedang mengusut kasus korupsi di Korps Lalu Lintas Polri dengan tersangka mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo.

Masyarakat, menurut anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, meyakini penarikan itu terkait dengan langkah KPK menggeledah dan mengusut kasus di Korlantas.

Akan tetapi, di dalam rapat itu seolah tidak ada masalah antara KPK dan Polri. "Rapat seperti ini baik-baik saja karena berlang-



Sumber: Litbang "Kompas"/YOH/YOG, diolah dari Laporan Tahunan KPK dan laman KPK

sung terbuka. Jika perlu, rapat berikutnya berlangsung tertutup hingga bisa diketahui yang sebenarnya terjadi," kata Taslim, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Kepala Polri menegaskan, penarikan 20 penyidik itu dilakukan karena masa tugasnya sudah habis dan mereka punya tugas

lain di Polri, seperti untuk tugas kewilayahan atau pendidikan. Mabes Polri akan mengganti penyidik yang ditarik dengan penyidik lain yang kualitasnya terbaik.

Busyro menghargai langkah dan sistem di Polri. Namun, KPK tetap berusaha agar 20 penyidik itu dapat diperpanjang masa tu-



KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain (kanan) dan Busyro Muqoddas, hadir dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang juga dihadiri Jaksa Agung Basrief Arief dan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9). Rapat membahas pola koordinasi dan sinergi pemberantasan korupsi di antara ketiga lembaga penegak hukum.

gasnya di KPK. Pasalnya, penyidik baru membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, hingga secara tidak langsung menipervulit kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi.

Di kepemimpinan Polri sebelumnya, KPK selalu dapat menanggulangi penarikan penyidik yang ditugaskan setelah KPK

mengirimkan surat.

Untuk memperlancar penanganan kasus korupsi, lanjut Busyro, KPK juga sedang mempersiapkan perekrutan penyidik di luar kepolisian. Namun, KPK punya kendala dalam menyediakan ruang kerja untuk mereka. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, penarikan ke-20

penyidik Polri sama saja melemahkan kerja mereka memberantas korupsi.

(NWO/BIL/WHY)



Lihat Juga Video "Rapat Komisi III dan KPK di DPR" di vod.kompas.com/rapatkomisi

Kompas, Sabtu 6 Oktober 2012



KORPRI/ALIFFY PRANSISKA

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Pati Inspektur Jenderal Dyoko Susilo memimpin pengantar Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (5/10) di Jakarta. Ia diperibsa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat stimulasi beresendara yang merugikan negara senilai lebih kurang Rp 100 miliar.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Alunan Lagu untuk Menguatkan KPK

Kesulitan sore, "Jamat ke-ranar" di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kembali riuh rendah dengan berbagai lontras susana. Di dalam Gedung KPK, Inspektur Jenderal Dyoko Susilo, tersangka kasus dugaan korupsi proyek stimulator beresendara, sedang di-periksa KPK.

Di luar Gedung KPK, tetapi masih di kompleks KPK, ben-trok antara polisi yang menjaga keamanan dan massa yang ber-unjuk rasa dari Komite Penye-lamat KPK tak terhindarkan la-gi. Di luar kompleks Gedung KPK sudah berkumpul pula ke-lompok pengunjuk rasa dari "Marta Pendukung Pemberan-tasan Korupsi".

Aktiva Usman Hamid tam-pak menjadi koordinator aksi tersebut. Ia berada di tengah-tengah seratusan anak-anak muda dengan bati-kepa bertuliskan "Save KPK, Bersihkan Polri". Beberapa orang menghentangkan tulisan "Kami Butuh Penarik Bukan Jenderal Busuk".

©:www.kompas.com Tieman mem-

perlihatkan Rendy Ahmad naik ke podium untuk menyampaikan lagu berjudul *Vonis*. Rendy ada-lah pemeran Ari dalam film *Song Pemimpi* Lailusari SMA Nasional Manggar di Belitung ini sudah beberapa tahun di Ja-karta dan akrab dengan komu-nitas dan pegat anti-korupsi.

"Pengusahan rakus bukan gun-dul. Berencana datang lak henti. Vonis hakim bisa dibeli."

Korupsior dilindungi," Suara khas dari nyanyian Rendy de-ngan diiringi gitar itu seolah mewakili semua kelompok pengunjuk rasa hari itu untuk menyuarakan sikapnya terhadap kondisi yang terjadi saat ini.

Sindoni menjadi salah satu elemen peserta unjuk rasa hari itu. Hadir pula para aktivis ka-wakan yang sudah senior ma-lang melintang di dunia gerak-an, seperti dari Indonesia Cor-ruption Watch, Lembaga Ban-tuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In-donesia, Baris Milgram, Badan Eksekutif Mahasiswa Universi-tas Indonesia, dan banyak lagi.

Di samping podium, M Ber-

lah Gambya, penulis lirik lagu *Vonis*, tampak antusias dan ber-semangat mengikuti unjuk rasa hari itu. Lirik lagu *Vonis* ditulis Gambya dengan latar belakang pengalamannya menggap sa-ling-kampan hidup untuk pendidikan anak sekolah sekaligus keprita-taan akan maraknya korupsi.

Pada 2 September lalu, lagu itu merembus kompetisi yang digelar JMI Foundation, Global Youth Anti-Corruption Youth Network, dan World Bank In-sstitute di Belgia sebagai juara II, menyngkatkan peserta dari 33 negara dengan total 75 video.

Tari kompedisi internasional dari Fair Play Global Music Video Competition 2012 dengan tema anti-korupsi," ujar Gambya.

Sindoni dan juga para aktivis anti-korupsi tersebut datang ke KPK untuk mendukung lemb-ga tersebut menangkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat stimulasi beresendara.

Dukungan itu bersamaan de-ngan pemertisan Inspektur Jenderal Dyoko Susilo sebagai tersangka kasus ini.

(AMIR SODIKIN)

Masyarakat Bela KPK

Tidak Ada Perintah Kepala Polri

SEJUMLAH DUKUNGAN UNTUK KPK

JAKARTA, KOMPAS — Upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terus terjadi. Jumat (5/10), sejumlah perwira polisi berusaha menjemput paksa para penyidik Polri yang bertugas di KPK. Semalam, masyarakat dan tokoh masyarakat mendatangi KPK untuk mendukung lembaga itu.

Sekitar pukul 21.30, sejumlah perwira polisi berpakaian preman mulai masuk ke lobi Gedung KPK. Hal itu terjadi tidak lama setelah penyidik KPK memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara



BACA JUGA HAL 2

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

di Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Hingga pukul 23.20, para perwira polisi yang mendatangi hendak menjemput paksa penyidik masih tetap tertahan di lobi.



Denny Indrayana

Wakil Menteri Hukum dan HAM

Menolak pelemahan KPK.
"Hanya orang-orang koruptor yang ingin KPK lemah dan bubarkan" (7/9/2012)

Sumber: Litbang "Kompas"/YOH, Diolah dari Pemberitaan "Kompas"

Koalisi Masyarakat Sipil

Menggalang dana untuk membangun gedung KPK melalui gerakan "Koin untuk KPK". (26/6/2012)

Komaruddin Hidayat, Anies Baswedan, Salahuddin Wahid, Hikmahanto Juwana, JE Sahetapy, Taufiq Ismail, Romo Benny Susetyo, dan Pendeta Natan Setiabudi

Mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan menolak rencana revisi UU KPK. (1/10/2012)

Puluhan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tergabung dalam Kaukus Antikorupsi

Mendukung KPK dan menolak revisi UU KPK. (2/10/2012)

ANDHI

Kompas Sabtu 6 Oktober 2012

Kompas, Sabtu 6 Oktober 2012

Masyarakat Bela KPK

(Sambungan dari halaman 1)

Mereka masih belum dizinkan naik ke tempat perkantonya penyidik KPK di lantai delapan gedung KPK.

Saat ini memang ada 20 penyidik Polri yang habis masa tugasnya di KPK. "Dari 20 penyidik Polri di KPK yang selesai masa tugasnya, KPK baru mengirim surat untuk menghadapkan sebanyak 15 penyidik ke Polri. Yang lima belum," kata Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Polri Komisaris Besar Agus Rianto, Jumat siang.

Menanggapi upaya jemput paksa penyidik Polri itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, apabila ada yang tidak berkenan dengan tindakan KPK memberantas korupsi, selesaikan secara hukum. "Kami perlu mengingatkan siapa pun, apalagi penegak hukum. Selesaikan masalah dengan hukum, tidak dengan melawan hukum, apalagi cara yang potensial disebut teror. Cukup sudah pengalaman menyakitkan masa lalu dan jangan ulangi lagi itu," kata Bambang.

Suasana di Gedung KPK tadi malam memang menegangkan. Sejumlah aparat kepolisian terlihat berada di sekitar Gedung KPK. Mereka antara lain terdiri dari perwira polisi dari Polda Metro Jaya. Terlihat pula polisi berpraktisi provokasi. Petugas pengamanan dalam KPK tidak bisa berbuat banyak ketika sejumlah polisi berpraktisi preman menyatakan hendak masuk ke Gedung KPK.

Sementara, sejumlah masyarakat dan sejumlah tokoh masyarakat datang dan membuat pagar betis di depan gedung KPK. Mereka antara lain Usman Hamid, Anies Baswedan, Fadjoel Rachman, Taufik Basri, dan Saldi Isra, termasuk Wakil Menteri

Hukum dan HAM Denny Indrayana. Semua pegawai KPK yang telah pulang ke rumah juga kembali ke kantornya.

Upaya jemput paksa penyidik masih berlangsung alot. Juga ada anggota DPR yang hadir, yaitu Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Suasana masih menegangkan karena sejumlah polisi masih berada di sekitar gedung.

Sejak siang, pimpinan KPK yang berada di Jakarta hanya dua orang, yakni Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Zulkarnaen. Ketua KPK Abraham Samad, sejak Jumat pagi, melayat ke Makassar karena kerabatnya meninggal. Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sejak Kamis berada di Samarinda. Hingga pukul 21.00 hanya Zulkarnaen, pemimpin KPK, yang masih berada di KPK karena Busyro berangkat ke Yogyakarta sore harinya. Bambang baru sampai di kantor KPK sekitar pukul 22.00.

Busyro mengatakan tak bisa kembali ke Jakarta karena tak ada pesawat malam dari Yogyakarta. Sementara Abraham di-kabarkan langsung bertolak dari Makassar menuju Jakarta.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, tidak ada perintah dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk menjemput paksa penyidik Polri di KPK. "Saya sudah cek, enggak ada itu," kata Djoko setelah menghunungi Timor, Jumat malam.

Brigjen (Pol) Boy Rafi Amar mengatakan, memang ada upaya penangkapan terhadap Komisaris Novel, salah satu penyidik Polri yang ditempatkan di KPK. Penangkapan itu terkait kasus lama, yaitu pada tahun 2004. Novel diduga melakukan peng-

aniayaan berat terhadap pencuri sarung burung walet. Saat ditanyakan kenapa kasus lama baru ditangani sekarang, Boy mengatakan, korbannya baru melapor sebulan lalu.

Novel merupakan penyidik andalan di KPK. Ia termasuk yang berani menghadapi polisi saat dihadang dalam pengeledahan di Korantas.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyatakan, tindakan Polri yang menjemput paksa penyidiknya yang bertahan di KPK adalah keliru. Hal itu karena Polri bukan militer lagi, tetapi organisasi sipil yang tunduk pada hukum sipil, yang dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kalau penyidiknya bertahan di KPK, itu bukan kejahatan (tindak pidana) yang bisa dijempit paksa. Kalau pun mereka salah, mereka hanya melanggar masalah administratif," kata Bambang.

Ia menegaskan, Polri harus bertindak sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh sewenang-wenang terhadap anggotanya. "Polri bukan militer sehingga tidak tepat jika mereka memperlakukan anggotanya seperti militer," katanya.

Di Gresik, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai, upaya penelaman KPK akan berdampak langsung dengan masyarakat. Ia meminta sejumlah pihak tak bermain-main dengan upaya penelaman KPK.

"KPK harus dipertahankan, dan jika perlu ditingkatkan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi," ujar Din sesuai membuka Pelatihan Nasional Kader Ahli Hisab Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur, Jumat.

(OSA/BIL/DIK/NWO/FEB/
ACI/EDN/WHY/ONG)

Kompas, Rabu 1 Agustus 2012

Rakyat Dukung KPK Bongkar Kasus SIM

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi pembuatan SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Untuk itu, Polri diharapkan mendukung pembertanahan korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat yang diduga terlibat korupsi.

Dukungan tersebut disampaikan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oce Madril, dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhine M Massardi, secara terpisah, di Jakarta. Selasa (31/7).

Keduanya mengkritik KPK yang menyidik kasus korupsi pengadaan alat *driving simulator* pembuatan SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dan menegkladah lembaga tersebut. Selain sampai Selasa pagi Menteri Direktur Lalu Lintas Polri, yang kini menjadi Gubernur Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah, Iyeh Djoko Susilo, diterapkan sebagai tersangka.

Oce Madril mengungkapkan, ini kali pertama KPK menyidik kasus korupsi di Polri dengan tersangka seorang elite polisi berpangkat bintang dua dan masih aktif.

Menurut Oce Madril, sebagai penyidik, KPK berwenang untuk menegkladah bekras-bekras, misalnya barang bukti, atau memblokir rekening yang mencurigakan. Siapa pun yang menghalang proses penyelidikan dan

penyidikan dapat dijera hukum pidana sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kepala Polri semestinya konsisten mendukung pembertanahan korupsi, dan harus dipastikan tidak ada gangguan dalam proses penyelidikan oleh KPK. Kalau begitu, Polri berniatif menyerahkan data yang dipunya kepolisian agar kasus tersebut sepe-munya disidik KPK," katanya.

Adhine M Massardi mengatakan, langkah KPK untuk mengusut korupsi di Polri sudah benar. Komisi tersebut diharapkan sungguh-sungguh menuntaskan kasus ini dan tidak menengkladah di tengah jalan dengan hanya memblok satu tersangka. Bongkar dugaan korupsi simulator SIM sampai ke puncak bukti.

"Kalau KPK sungguh-sungguh, publik akan menonton dan menjadi supporter fanatik. Publik bisa marah jika tin kesyangannya dicurangi," katanya.

Komisi Kepolisian Nasional menyelesaikan sikap kepolisian yang menghalang-halangi petugas KPK. Tindakan itu tidak sejalan dengan likud kepolisian dalam memberantas korupsi.

"Kami akan membahas tindakan polisi yang menghalang-halangi pengkladahan KPK dengan anggota lainnya," ujar Komisiner Komisi Kepolisian Nasional Hamidah Abdurrahman, di Bandung, Jawa Barat, kemarin. (IAM/DIK/ELD)

Penahanan Tersangka Bisa Hambat KPK

JAKARTA — Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Cadijiah Mada menilai penahanan lima tersangka kasus korupsi simulator ujian pembuatan surat izin mengemudi oleh polisi bisa menghambat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, menurut Oce Madril, Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi, tiga di antaranya juga sudah menjadi tersangka dan diusut KPK. "Ini strategi polisi agar KPK hanya mengusut sampai Inspektur Jenderal Djoko Susilo saja," ujar Oce kemarin.

Polisi kemarin menahan tiga perwiranya yang diduga terlibat proyek simulator ujian SIM senilai Rp 196 miliar. Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Sutarnan, mereka adalah Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir

Jenderal Didik Purnomo, Ketua Primer Koperasi Polisi Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, dan Bendahara Korps Lantas Komisaris Legimo. Mereka ditahan di Markas Komando Brimob Kepala Dua, Depok, Jawa Barat. Polisi juga menahan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S. Bambang dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, rekanan proyek. Keduanya ditahan di Mabes Polri.

Dari nama-nama tersebut, tiga di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka adalah Didik Purnomo, selaku pejabat pembuat komitmen proyek, serta Sukotjo S. Bambang dan Budi Susanto. Penetapan ketiganya itu satu hari setelah komisi antirasuah menetapkan Djoko Susilo, bekas

Kepala Korps Lalu Lintas yang kini Gubernur Akademi Kepolisian, sebagai tersangka pada 27 Juli lalu.

Penahanan para perwira di Mako Brimob, menurut Oce, ditengarai bisa menutup akses KPK untuk meminta keterangan mereka sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan Jenderal Djoko. Dia khawatir pemeriksaan para tersangka oleh polisi tak akan lepas dari konflik kepentingan. "Masak iya, polisi memeriksa sesama rekannya," tuturnya.

Adapun juru bicara Mabes Polri Brigadir Jenderal Anang Iskandar, membantah penahanan bakal mempersulit KPK. "Tidak masalah kalau ada koordinasi," katanya kemarin. Anang menambahkan, polisi telah menonaktifkan Djoko sebagai Gubernur Akademi Kepolisian. ● SUBAHYU | SUMBA

7

DUGAAN KORUPSI SIMULATOR SIM

Penyidik KPK Profesional, Tak Segan Periksa Djoko Susilo

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, penyidik KPK yang berasal dari kepolisian akan sangat profesional dalam memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator berkendaraan di Korps Lalu Lintas Polri. KPK tidak akan segan memeriksa tersangka kasus ini, Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, KPK telah membentuk satuan tugas untuk menangani kasus ini yang dikepalai penyidik berpangkat ajun komisaris besar. "Saya kira tidak akan ada konflik kepentingan. Kami menghormati profesionalitas penyidik di KPK," kata Johan di Jakarta, Senin (3/9).

Menurut Johan, KPK punya

pengalaman memeriksa jenderal bintang empat, seperti dalam kasus pungutan liar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rusdihardjo. Rusdihardjo adalah mantan Kepala Polri.

Namun, *Kompas* pernah mendapat informasi, pemeriksaan Rusdihardjo kala itu diwarnai kekagokan penyidik KPK karena yang diperiksa mantan atasan mereka. Hal ini teratasi setelah pimpinan KPK mengganti penyidik dengan penyidik yang bukan dari unsur kepolisian.

Kemarin, KPK kembali memeriksa tiga perwira polisi, yaitu Ajun Komisaris Besar Heru Trisasono, Ajun Komisaris Besar Susilo Wardono, dan Ajun Komisaris Besar Indra Darmawan Irian-

to. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Djoko Susilo.

Jumat pekan lalu, KPK memeriksa empat perwira polisi yang menjadi panitia pengadaan proyek simulator SIM 2011, Ajun Komisaris Besar Wisnu Budhaya, Ajun Komisaris Besar Wandu Rustiwan, Komisaris Endah Purwaningsih, dan Komisaris Ni Nyoman Suwartini.

Terkait koordinasi yang dilakukan KPK dengan Polri untuk penanganan kasus ini, Johan mengatakan belum ada hasil. KPK menetapkan tiga tersangka lain selain Djoko dalam kasus ini, yakni mantan Wakil Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, pengusaha Sukotjo Bambang, dan Budi Susanto. Ketiganya juga ditetapkan sebagai

tersangka oleh Mabes Polri.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak kunjung menengahi sengketa antara KPK

dan Polri dalam menangani kasus korupsi simulator. "Presiden bisa memerintahkan Kapolri untuk menyerahkan kasus simulator ke KPK. Ini bukan intervensi hukum," katanya.

(BIL/FAJ)

Kompas, Selasa 4 September 2012

PEMBERANTASAN KORUPSI

Setelah Rencana Polisi Menarik Penyidik

Semua pihak, baik Presiden, anggota legislatif maupun penegak hukum, menentang pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Namun, ketika pemberantasan korupsi mulai gencar dilakukan, Komisi Pemberantasan Korupsi justru diumumkan oleh berbagai pihak

Semua tahu, KPK, dalam hearing tentang genai pemberian tas korupsi. Praktik korupsi yang semua hanya jadi pengingian kinu diungkap. Putuhan anggota DPR didaksa dalam kasus cek pelawat. Badan Anggaran juga ditelaski

Sejumlah kepala daerah, hakim, jaksa, dan pegawai pajak berturut-turut ditangkap KPK. Korupsi oleh pengurus partai politik mulai terkuak. Sejumlah

pengurus teras Partai Demokrat
dicocokkan satu persatu. Ada M.
Nazaruddin, Angelina Sondakh,
Ibunda Siti Hartati Murdaya.
Parpol lain juga terkena sepek
terjang KPK.

Paling mencengangkan, dalam heningnya, KPK meneliskorupsi: pengadaan alat simulasi

untuk ujian SIM di Korps Lalu Lintas Polri. KPK menetapkan Kepala Korlantas saat itu, Ijen Djoko Susilo, sebagai tersangka.

Hapen muncul dengan kerja KPK. Korupsi yang mungkin bisa diberangus. Kecewaan terhadap kepolisian dan kejaksaan yang lamban dan sarat kepentingan sedikit terobati dengan kerja KPK.

KPK memang tidak sempurna. Namun, untuk pemberantasan korupsi, KPK melampaui kerja kepolisian dan kejaksaan.

KPK tidak hanya lebih berintegritas, transparan, dan akuntabel, tetapi juga lebih efisien dan lebih responsif terhadap kepentingan dan kelangkaan. Pencegahan korupsi yang bersih dan runtut disikid dan diujikan ke pengadilan tak lebih dari ngabubur. Bandingkan dengan Kejaksaan Agung yang penanganannya persentase memakan waktu lebih dari enam bulan, bahkan mangkrak tak tahun.

ANCAMAN TERHADAP KPK

Kasus Hukum Pimpinan KPK

- Hambatan terhadap pelaksanaan tugas KPK ketika Ketua KPK Antasari Azhar terlibat kasus hukum. (2009)

RUU Pemberan-
tasan Tipikor
jii materi ke MK

- Muncul wacana penghapusan hukuman mati dari hukuman seumur hidup bagi koruptor.
- Upaya mereduksi wewenang KPK, seperti penyadapan hants

eleksi pimpinan

- Muncul gagasan pembubaran KPR, KPR tidak ada artinya

Hambatan saat

- Langkah KPK menggeledah gedung Kodamnas Poljak II.

Number: Litbang/Ko/

Kompas/VOH/VOG, diolah dari pemberitaan "Kompas"

Padahal, penyidik KPK hanya 7 orang dan harus bekerja full

KPK, juga lebih berkomitmen dalam responsif. Ukurannya, bisa dilihat dari respons penegak hukum terhadap laporan hasil analisis (LHA) PPATK yang berisi transaksi-transaksi keuangan

encungakan berindikasi korupsi. Hingga Juli 2012, KPK menerima 283 LHA dan semua kasus yang ditindaklanjuti KPK. Periode yang sama, polisi hanya merespons 43 persen LHA. Para pahlawan yakni kejaksan yang merespons 2 persen.

Namru, di tengah gencarnya pelepasan KPR dan tunjukkan, para petani, terutama para petani yang telah menerima KPR, telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap KPR. Hal ini dapat dilihat dari jumlah KPR yang telah diterima petani, yaitu sebanyak 1.000 KPR, dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa petani telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap KPR. Hal ini dapat dilihat dari jumlah KPR yang telah diterima petani, yaitu sebanyak 1.000 KPR, dengan nilai sebesar Rp 1.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa petani telah menunjukkan minat yang tinggi terhadap KPR.

Revisi KPR lembaga *ad hoc*. Rencana revisi lain adalah penyediaan harus minta izin tertulis dari ketua pengadilan negeri. Kewenangan KPK mengenai penuntutan diberikan ke kejaksan. Padahal, kewenangan-kewenangan itu yang membuat KPK diapresiasi.

Tanggal 12 Juni 2008, KPK

meminta tambahan dana untuk pembangunan gedung senilai Rp

187,9 miliar. Komisi III DPR
hingga kini tidak setuju. Kini,
jumlah pegawai KPK 714 orang.
Beberapa tahun ke depan akan
ditingkatkan menjadi 1.394
orang. Ruang tahanan pun su-
dah hampir penuh.

Pemolakan ini membuat KPK pontang-panting mencari tempat atau gedung milik instansi lain. Karena mendesak, KPK pinjamkan Rutan TNI di lingkungan Kodam Jaya.

terbaru. Polri menolak perpanjangan 20 penyidik di KPK, jumlah yang besar mengingat total penyidik 87 orang. "Perhatikan 20 penyidik jelas akan memecahkan KPK. Untuk mendapatkan ganti 20 penyidik tersebut, tentu harus melalui proses panjang."

jika polisi punya niat baik memberantas korupsi, pemerintahan perpaungannya dari KPK akan diterima. Untuk penarikan penyidik ini, KPK dan polisi tengah mencari penyelesaian. Hasilnya bisa jadi bekal untuk membuat penilaian.

(MEFAJAR MARTA)



Lineat Video Terkait
"Polri Tarik Penyidik KPK"
di [vod.kompas.com/
penyidikpolnitrarik](http://vod.kompas.com/penyidikpolnitrarik)